



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka keamanan dan akses arsip dinamis, perlu disusun metode dalam menjamin kebutuhan terhadap akses arsip dinamis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas/Badan, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Rumah Sakit Daerah, dan Lembaga Lain.
3. Dinas Kearsipan Kabupaten Balangan yang selanjutnya disebut DINSIP adalah Dinas Kearsipan Kabupaten Balangan yakni sebagai Lembaga Kearsipan berbentuk dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kearsipan.

4. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
5. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip yang disimpan selama jangka waktu tertentu.
6. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip dilingkungannya.
7. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
8. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
9. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
10. Klasifikasi Keamanan Arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan Negara, masyarakat dan perorangan.
11. Klasifikasi Akses Arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
12. Pengamanan Arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
13. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
14. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
15. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan Negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap *privacy*, keuntungan kompetitif hilangnya kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi.
16. Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
17. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama

bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.

18. Penggunaan Arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
19. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
20. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
21. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
22. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyediaan dan/ atau pelayanan informasi di Bidang Publik.

Pasal 2

Maksud dari Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis adalah sebagai berikut:

- a. mendorong unit-unit kerja agar memberkaskan arsip dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktifnya;
- b. memberikan petunjuk kepada unit-unit kerja agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
- c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan reabilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
- d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 3

Tujuan dari Klasifikasi dan Keamanan Arsip Dinamis adalah sebagai berikut:

- a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah dan aman;
- c. tersedianya informasi Pemerintah Daerah yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan lampiran klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
- d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan
- e. terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.



Pasal 4

Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. arsip yang tercipta pada instansi pencipta dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
- b. tingkat klasifikasi sebagaimana tersebut pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. tingkat klasifikasi sebagaimana tersebut pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
- d. setiap pegawai Pemerintah Daerah hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya; dan
- e. publik dapat mengakses informasi yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

BAB II RUANG LINGKUP DAN ASAS KLASIFIKASI

Bagian kesatu Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Klasifikasi Keamanan dan Akses arsip Dinamis, mencakup antara lain:

- a. klasifikasi keamanan arsip, memuat informasi biasa/umum/terbuka, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
- b. pengamanan arsip, memuat informasi terbatas, rahasia dan sangat rahasia; dan
- c. klasifikasi dan pengaturan akses arsip, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal.

Bagian kedua Asas Klasifikasi

Pasal 6

- (1) Asas klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan menerapkan asas gabungan.
- (2) Asas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sentralisasi dalam penetapan kebijakan dan desentralisasi dalam pelaksanaan di lapangan.
- (3) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyusunan dan penerapan pedoman serta standar operasional prosedur, sumber daya manusia, sarana, dan prasarana.



BAB III ARSIP DINAMIS

Pasal 7

- (1) Arsip Dinamis Pemerintah Daerah dapat diakses oleh pengguna secara internal dan eksternal.
- (2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Bupati, sebagai pimpinan tingkat tertinggi di Daerah, dapat mengakses seluruh arsip yang berada dibawah kewenangannya;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai pimpinan tingkat tinggi di Daerah, dapat mengakses arsip dibawah kewenangannya, tapi tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan yang satu level dengan unit diluar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah sebagai pimpinan tingkat tinggi, dapat mengakses seluruh arsip sesuai bidangnya setelah mendapatkan izin dari pimpinan tinggi yang terkait;
 - d. Kepala SKPD dan Pejabat Eselon III (Sekretaris/ Kepala Bidang/ Kepala Bagian) sebagai pimpinan tingkat menengah, dapat mengakses seluruh arsip di bawah kewenangannya, namun tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dan satu level di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin;
 - e. Pejabat Eselon IV (Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang), Fungsional arsiparis, dan aparatur sipil Negara (ASN) sebagai pejabat pelaksana, hanya dapat mengakses seluruh arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas, dankewenangannya dengan tingkat klasifikasi biasa; dan
 - f. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh arsip pada penciptaan arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. pengawas ekstenal mempunyai hak untuk mengakses seluruh arsip pada pencipta arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. aparat penegak hukum mempunyai hak untuk mengakses arsip pada pencipta arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegak hukum; dan
 - c. publik dapat mengakses informasi yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan.

Pasal 8

- (1) Sarana klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).

- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filling cabinet*/ rak arsip untuk penyimpanan arsip biasa/ terbuka dan terbatas, dan brankas dan lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
 - sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
 - prasarana berupa ruang penyimpanan yang representative sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.
- (3) Perangkat lunak (*Software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
 - aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

Pasal 9

- Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola arsip yang bertugas mengelola arsip harus dipilih pegawai yang profesional baik dalam substansi kearsipan maupun dalam dedikasi dan integritas.
- Pejabat Fungsional Arsiparis dan/atau pengelola arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

Pasal 10

Arsip dinamis Pemerintah Daerah terbagi menjadi tiga (3) kategori yang meliputi :

- biasa/terbuka
- terbatas; dan
- rahasia.

Pasal 11

Arsip dinamis yang termasuk ke dalam kategori arsip biasa/terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Daerah antara lain:

- arsip dinamis yang meliputi urusan pertanian;
- arsip dinamis yang meliputi urusan perdagangan;
- arsip dinamis yang meliputi urusan perhubungan;
- arsip dinamis yang meliputi urusan kelautan dan perikanan;
- arsip dinamis yang meliputi urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- arsip dinamis yang meliputi urusan lingkungan hidup;
- arsip dinamis yang meliputi urusan perindustrian;
- arsip dinamis yang meliputi urusan penanggulangan bencana;



- i. arsip dinamis yang meliputi urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- j. arsip dinamis yang meliputi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- k. arsip dinamis yang meliputi urusan pariwisata ekonomi kreatif;
- l. arsip dinamis yang meliputi urusan sosial;
- m. arsip dinamis yang meliputi urusan kehutanan;
- n. arsip dinamis yang meliputi urusan ketenagakerjaan, dan transmigrasi;
- o. arsip dinamis yang meliputi urusan kesehatan;
- p. arsip dinamis yang meliputi urusan pemerintah daerah;
- q. arsip dinamis yang meliputi urusan pendidikan;
- r. arsip dinamis yang meliputi urusan pemuda dan olahraga;
- s. arsip dinamis yang meliputi urusan agama;
- t. arsip dinamis yang meliputi urusan energi dan sumber daya mineral;
- u. arsip dinamis yang meliputi urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang; dan
- v. arsip dinamis yang meliputi fungsi kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara, keuangan, non keuangan dan non kepegawaian yaitu, perencanaan, hukum, organisasi dan tatalaksana, kearsipan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, penelitian pengkajian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, kepustakaan, teknologi informasi dan telekomunikasi, persandian, dan pengawasan.

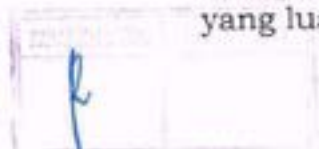
Pasal 12

Arsip dinamis yang termasuk kedalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan, yang meliputi :

- a. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Kepegawaian seperti *personal file*, hasil pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, rekam medis pegawai;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Kepegawaian seperti Pengadaan Barang/Jasa seperti dokumen pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah;
- c. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Inspektorat Daerah seperti Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal serta Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Independen;
- d. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Keuangan seperti berkas pengelolaan anggaran di setiap unit kerja; dan
- e. arsip dinamis yang tercipta dari kegiatan administrasi Kearsipan seperti daftar arsip vital dan daftar arsip terjaga.

Pasal 13

Arsip Dinamis yang termasuk kedalam kategori arsip rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja Pemerintah Daerah yang meliputi :



- a. arsip dinamis yang tercipta berkenaan dengan masalah keorganisasian, administrasi kepegawaian, dan Hukum seperti kasus/sengketa hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan *personal file*;
- b. arsip dinamis yang tercipta dari Biro Umum seperti sertifikat tanah, rancang bangun instalasi telepon, instalasi listrik, daftar arsip vital, dan lain-lain; dan
- c. arsip dinamis yang tercipta dari Inspektorat seperti tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 14

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip.
- (2) Pengamanan arsip kategori umum disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas disimpan pada *filig cabinet*, dan arsip kategori rahasia disimpan pada lemari besi.

Pasal 15

- (1) Penentuan Pengelolaan Arsip meliputi pejabat Fungsional Arsiparis dan Pengelola Arsip Aktif (PAA) di *Central File* Pemerintah Daerah.
- (2) Arsiparis sebagai pengelola arsip inaktif berperan dalam pengamanan arsip di *Records Center* (Pusat Arsip) dalam menetapkan hak akses arsip.
- (3) Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip Aktif (PPA) mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengelola arsip di *central file*.

Pasal 16

- (1) Pengamanan Informasi Arsip Dinamis Pemerintah Daerah meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (2) Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di *Records Centre* dan *Central File*.

Pasal 17

Tabel Klasifikasi Keamanan dan Pengamanan Akses Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 29 Oktober 2018


BUPATI BALANGAN,
TTD
H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 29 Oktober 2018


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

TTD
H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya


**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**


**H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PERTANIAN				
1	KEBUDUKAN Kebijakan di bidang Hortikultura, Sarana Prasarana Pertanian, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner dan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan
2	PEMILIHAN a. Data pengadaan, penyuluran, penggunaan dan peredaran (benih, pupuk, pestisida dan alat mesin) b. Penyediaan fasilitas pengembangan (lahan, pemadatan sumber - sumber air, produksi pertanian) c. Penyebarluasan lahan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan
3	PENGEMBANGAN LAHAN DAN PRODUKSI a. Data potensi sumber daya lahan dan air b. Data perkembangan pengembangan lahan dan produksi pertanian c. Sumber daya lahan dan tata guna air d. Konservasi dan rehabilitasi lahan e. Sistem kewaspadaan pangan dan gizi	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan
	f. Data kawasan dan sentra - sentra produksi pertanian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan
	g. Luas panen, Produksi dan Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura	Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan
	h. Laporan hasil kegiatan pengembangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan
4	PEMASARAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERTANIAN 1) Bina usaha pertanian a. Pengembangan usaha pertanian b. Data pengembangan usaha	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	c. Bahan dan sarana d. Promosi dan pengembangan usaha e. Laporan pengembangan usaha 2) Kemitraan dan kewirausahaan pertanian a. Data kemitraan dan kewirausahaan b. Laporan kemitraan dan kewirausahaan 3) Mutu, distribusi dan pemasaran hasil pertanian a. Data kinerja benih/bibit dan mutu hasil pertanian b. Akreditasi mutu benih/bibit c. Bahan pembinaan uji mutu d. Sertifikat benih/bibit, mutu hasil pertanian e. Data penawaran dan permintaan hasil pertanian f. Laporan mutu distribusi dan pemasaran g. Penentuan harga pasar h. Pemasaran hasil produksi meliputi: Penentuan harga pasar,pemasaran antar pulau,pemasaran luar negeri dan sertifikat ekspor PEMBENIHAN DAN PENGEMBANGAN 1) Data pengadaan, penyaluran, penggunaan dan peredaran benih dan teknologi 2) Sistem perbenihan tanaman pangan dan hortikultura 3) Pengembangan teknologi pertanian (produksi, sarana dan prasarana, pengolahan hasil pertanian, alat dan mesin, perbenihan) PROGRAM EIMAS/LINMAS (Program intensifikasi dan ekstensifikasi) Serangan penyakit dan hama tanaman 1) Pencegahan 2) Pemberantasan 3) Perlindungan (Horti) BIMBINGAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PENGUSAHA DAN PETANI	Tertutup	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan
5		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan
6		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan
7		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	- Analisis dan Penyajian Data Laban (b) Pengendalian Laban - Identifikasi dan Analisis Laban - Rekomendasi Teknis pengendalian lahan (c) Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan - Identifikasi dan Analisis optimasi, rehabilitasi dan - Bimbingan Teknis optimasi, rehabilitasi dan konservasi (d) Perluasan Kawasan Tanaman Pangan - Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan tanaman - Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan (e) Perluasan Kawasan Hortikultura - Identifikasi dan Analisis perluasan kawasan hortikultura - Bimbingan Teknis dan evaluasi perluasan kawasan hortikultura.				
(2)	Pengelolaan Air Irigasi (a) Pengembangan Sumber Air - Air Permukaan - Air Tanah (b) Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air - Pengembangan Jaringan - Optimasi Air (c) Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup - Iklim - Konservasi Air dan Lingkungan Hidup (d) Kelembagaan - Identifikasi Kelembagaan - Pengembangan Kelembagaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan
(3)	Pembiayaan Pertanian (a) Pembiayaan Program - Data dan Informasi pembiayaan program - Pendampingan dan Bimbingan Teknis pembiayaan (b) Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama - Pembiayaan Syariah - Kerja Sama pembiayaan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(c) Pembiayaan Agribisnis - Materi dan Verifikasi pembiayaan agribisnis - Fasilitas dan Pemantauan pembiayaan agribisnis (d) Kelembagaan dan Pemberdayaan Agribisnis - Kelembagaan Agribisnis - Pemberdayaan Agribisnis (4) Pupuk Pestisida (a) Pupuk Organik dan Pembenah Tanah - Tanaman Pangan - Hortikultura (b) Pupuk Anorganik - Tanaman Pangan - Hortikultura (c) Pestisida - Pestisida Kimia - Pestisida Hayati (5) Alat dan Mesin Pertanian (a) Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian - Tanaman Pangan dan Hortikultura (b) Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian - Tanaman Pangan dan Hortikultura (c) Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian - Kelembagaan - Pelayanan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan
	(5) Alat dan Mesin Pertanian (a) Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian - Tanaman Pangan dan Hortikultura (b) Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian - Tanaman Pangan dan Hortikultura (c) Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian - Kelembagaan - Pelayanan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan
10	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN (1) Pengolahan Hasil Pertanian (a) Tanaman Pangan - Serrealia - Aneka Kacang dan Aneka Umbi (b) Hortikultura - Tanaman Buah dan Sayuran - Tanaman Florakultura dan Tanaman Obat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(2) Muta dan Standardisasi		Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan
	(a) Standardisasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura (b) Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu - Tanaman Pangan dan Hortikultura (c) Akreditasi dan Kelembagaan - Tanaman Pangan dan Hortikultura (d) Kerjasama dan Harmonisasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura	Terbatas			
	(3) Pengembangan Usaha dan Investasi				
	(a) Kemitraan dan Kewirausahaan - Kemitraan - Kewirausahaan dan Ekonomi Kreatif (b) Investasi - Tanaman Pangan dan Hortikultura (c) Promosi Dalam Negeri - Ekspansi dan Ekspo	Biasa/Terbuka		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan
	(4) Pemasaran Domestik				
	(a) Informasi Pasar - Analisis Pasar - Deseminasi Informasi Pasar (b) Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga - Pemantauan Pasar - Stabilisasi Harga (c) Sarana dan Kelembagaan Pasar - Sarana Pasar - Kelembagaan Pasar (d) Jaringan Pemasaran - Akses Pasar - Sarana Pemasaran	Biasa/Terbuka		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan
11	PERKEBUNAN		Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar				
	2) Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan a. Identifikasi Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan b. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan 3) Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran a. Dampak Perubahan Iklim b. Pencegahan Kebakaran	Terbatas Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan DISTAN Kab. Balangan
	- E Pembinaan Usaha 1) Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan a. Bimbingan Usaha Perkebunan b. Perkebunan Berkelanjutan 2) Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik a. Gangguan Usaha Perkebunan b. Penanganan Konflik 3) Proses Penyelesaian Pengusutan Benih Ilegal 4) Proses Penyelesaian Pengusutan Peredaran Pupuk dan Peredaran Pestisida	Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon IV Eselon III Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan DISTAN Kab. Balangan DISTAN Kab. Balangan DISTAN Kab. Balangan
12	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN A Pertubitan Ternak 1) Produksi Bibit Ternak Ruminansia - Produksi Bibit Ternak Ruminansia Besar 2) Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak - Penilaian Bibit Ternak B Pakan Ternak	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENCOLAH
1	2	3	4	5	6
	1) Pakan Hewan - Kawasan Penggembalaan dan Integrasi Ternak 2) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran C. Budidaya Ternak 1) Ternak Potong - Ternak Sapi dan Kerbau Potong D. Kesehatan Hewan 1) Pengamatan Penyakit Hewan a. Epidemiologi dan Ekonomi Veteriner b. Penyidikan Penyakit Hewan 2) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan a. Pencegahan Penyakit Hewan b. Pemberantasan Penyakit Hewan 3) Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan a. Kelembagaan Kesehatan Hewan b. Sumber Daya Kesehatan Hewan c. Proposal Poskeswan 4) Pengawasan Obat Hewan a. Mutu Obat Hewan b. Peredaran Obat Hewan E. Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen 1) Pascapanen a. Teknologi Pascapanen b. Sarana Pascapanen 2) Higien Sanitasi a. Penerapan Higien Sanitasi 3) Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan a. Pengawasan Keamanan Produk Hewan 4) Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan a. Zoonosis b. Kesejahteraan Hewan 5) Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISTAN Kab. Balangan DISTAN Kab. Balangan DISTAN Kab. Balangan DISTAN Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
II	KETAHANAN PANGAN A Harga dan Cadangan Pangan 1) Data harga pangan pokok Kabupaten/Kota 2) Data pasokan di pasar dan eceran 3) Stok cadangan pangan B Distribusi Pangan 1) Pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM) 2) Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM) 3) Akses pangan C Pengawasan Keamanan Pangan 1) Pengujian keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) (a) Uji laboratorium (b) Uji rapid tes kit 2) Laporan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) D Kelembagaan dan Informasi Keamanan Pangan 1) Sistem jaminan mutu OKKPD (a) Pelaku usaha (b) Uji laboratorium (c) Produsen pangan 2) Informasi keamanan pangan E Kerawanan Pangan 1) FSVA 2) SKPG 3) Database desa mandiri pangan 4) Database kawasan mandiri pangan 5) Daerah rawan pangan F Ketersediaan Pangan 1) Lumbung pangan 2) Analisis ketersediaan pangan (a) HBKN	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DKP Kab. Balangan DKP Kab. Balangan DKP Kab. Balangan DKP Kab. Balangan DKP Kab. Balangan DKP Kab. Balangan DKP Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
G	(b) PPH Ketersediaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DKP Kab. Balangan
	Promosi dan Pengancarakaragaman Pangan				
H	1) Promosi pengancarakaragaman pangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DKP Kab. Balangan
	(a) Pameran				
	2) Diversifikasi pangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DKP Kab. Balangan
	Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal				
	1) Pengembangan pangan lokal	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DKP Kab. Balangan
	(a) KRPL				
	(b) Usaha kecil menengah (UKM)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DKP Kab. Balangan
	Pengelolaan konsumsi pangan masyarakat				
	(a) Lomba cipta menu (LCM)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DKP Kab. Balangan
	(b) Beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA)				
	(c) Pola pangan harapan (PPH)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DKP Kab. Balangan
	3) Pokjional Posyandu				
III	URUSAN PERDAGANGAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Perdagangan Kab. Balangan
1	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA PERDAGANGAN				
2	PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Perdagangan Kab. Balangan
3	PELELANGAN BARANG KOMODITAS	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Perdagangan Kab. Balangan
4	PROMOSI / PEMASARAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Perdagangan Kab. Balangan
	(A) Pameran Perdagangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Perdagangan Kab. Balangan
	(B) Iklan				
5	PENGAWASAN DISTRIBUSI/PENYALURAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Perdagangan Kab. Balangan
6	PERDAGANGAN ANTAR PULAU	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Perdagangan Kab. Balangan
7	SURAT KETERANGAN ASAL (SKA) BARANG	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Perdagangan Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
8	PERLINDUNGAN KONSUMEN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Perdagangan Kab. Balangan
9	PENGUNAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN PERGUDANGAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Perdagangan Kab. Balangan
10	ANEKA USAHA PERDAGANGAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Perdagangan Kab. Balangan
11	BIMBINGAN DAN PENYULUHAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Perdagangan Kab. Balangan
12	STANDARISASI HARGA	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Perdagangan Kab. Balangan
IV	URUSAN PERHUBUNGAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISHUB Kab. Balangan
1	KEBLAJAKAN MENGENAI PERHUBUNGAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISHUB Kab. Balangan
2	LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA				
	A. Jaringan prasarana dan pelayanan:				
	1) Penentuan dan penetapan lokasi terminal				
	2) Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal				
	3) Pemanfaatan terminal				
	4) Jaringan trayek angkutan, jaringan lintas jalan primer, dan jaringan				
	5) Penetapan kelas jalan primer				
	6) Kualifikasi teknis petugas terminal				
	B. Pengembangan transportasi jalan				
	1) Peta jalan raya				
	2) Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan				
	3) Pengembangan transportasi jalan				
	C. Sarana angkutan jalan				
	1) Pengujian kendaraan bermotor				
	2) Teknologi kendaraan bermotor (pengujian, persyaratan teknis dan layak jalan, harmonisasi dan standarisasi regulasi kendaraan bermotor)				
	D. Lalu lintas jalan				

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	1) Manajemen dan rekayasa lalu lintas 2) Perencanaan jalan E. Angkutan jalan 1) Angkutan penumpang 2) Angkutan barang F. Pengendalian operasional 1) Monitoring operasional 2) Teknis penyidikan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN A. Jaringan transportasi (analisa, evaluasi, trayek dan pengembangan) angkutan sungai, danau dan penyeberangan B. Sarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan C. Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan D. Peta aliran sungai, peta wilayah danau, tata cara, dan pengawasan lalu lintas Lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISHUB Kab. Balangan
3	PENYULUHAN Meliputi : Program, metode, pembinaan, percontohan jadwal waktu, pembiayaan dan laporan BANTUAN DANA, PENANAMAN MODAL.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISHUB Kab. Balangan
4	STANDARISASI PERHUBUNGAN Meliputi : Sarana dan prasarana, data dan statistik PEMASARAN HASIL PRODUKSI Meliputi: Promosi perhubungan, perlindungan, perhubungan, penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau dan pemasaran luar negeri PERIZINAN Meliputi : izin mengemudi, izin trayek, izin jalan, izin laut, izin udara dan pemasangan kabel KEAMANAN DAN KETERTIBAN Meliputi : Ketrampilan lalu lintas, pencegahan dan penyelesaian pelanggaran, pengamanan frekuensi, penyeberangan, pengawasan radio amatir dan penetapan jaringan LAPORAN	Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISHUB Kab. Balangan DISHUB Kab. Balangan DISHUB Kab. Balangan DISHUB Kab. Balangan DISHUB Kab. Balangan DISHUB Kab. Balangan DISHUB Kab. Balangan
5					
6					
7					
8					
9					
10					

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
V					
1	URUSAN PERIKANAN KEBLAJAKAN Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Perikanan Kab. Balangan
2	PERIKANAN TANGKAP A Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan 1) Pengelolaan pemanfaatan dan menjaga kelestarian sumberdaya penangkapan 2) Pengelolaan kawasan tangkapan yang mempunyai sumberdaya penangkapan potensial B Sarana dan Prasarana Penangkapan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Perikanan Kab. Balangan
3	PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN A Perizinan Usaha dan Investasi 1) Pengelolaan perizinan usaha 2) Data potensi perikanan 3) Pemeriksaan permohonan izin usaha 4) Penerbitan izin usaha B Teknologi dan Informasi 1) Petunjuk teknis teknologi dan informasi 2) Data pelaku usaha 3) Bimbingan teknologi dan informasi 4) Evaluasi pengembangan teknologi dan informasi C Sarana dan Prasarana Budidaya Pengolahan dan Pemasaran 1) Petunjuk teknis sarana dan prasarana budidaya pengolahan 2) Data sarana prasarana budidaya pengolahan dan pemasaran perikanan 3) Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana budidaya pengolahan pemasaran perikanan 4) Memfasilitasi pembangunan 5) Pemantauan pengembangan pembangunan sarana dan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Perikanan Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
4	prasarana budidaya 6) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran PENGENDALIAN SUMBER DAYA PERIKANAN A Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan 1) Rencana pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan 2) Bimtek pemantauan sumber daya perikanan 3) Jadwal pelaksanaan pengawasan sumber daya perikanan 4) Rencana operasi pengawasan penangkapan ikan 5) Pemantauan kelompok masyarakat pengawasan sumber daya perikanan 6) Monitoring dan evaluasi pemantauan dan pengawasan sumber daya perikanan B Penanganan Pelanggaran dan Pencegahan Hukum 1) Rencana penanganan pelanggaran dan pencegahan hukum 2) Data pelanggaran dan konflik masyarakat perikanan 3) Bimtek pelanggaran kelautan dan perikanan 4) Pemantauan penanganan dan pelanggaran dan penegakan hukum 5) Monitoring dan evaluasi penanganan dan pelanggaran dan penegakan hukum C Sarana dan Prasarana pengawasan 1) Rencana sarana dan prasarana pengawasan 2) Data sarana dan prasarana pengawasan 3) Sosialisasi dan Bimtek sarana dan prasarana pengawasan 4) Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan 5) Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan 6) Fasilitas sarana dan prasarana pengawasan 7) Pemantauan pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan 8) Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pengawasan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Perikanan Kab. Balangan
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Perikanan Kab. Balangan
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Perikanan Kab. Balangan
VI 1	URUSAN PENANAMAN MODAL Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengolahan data dan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
2	Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data, pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
3	Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
4	Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
5	Menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
6	Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
7	Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
8	Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
Pengendalian Penanaman Modal					
1	Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
2	Mengumpulkan, Mengolah, Menganalisis dan menyajikan data pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
3	Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
4	Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
5	Menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
6	Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
7	Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
8	melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
	Pengembangan Penanaman Modal	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
	- Dokumen profil penanaman modal tahun 2017 sektor tersier (parawisata)				
	Perencanaan Penanaman Modal	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
	- Naskah akademis rencana umum penanaman modal (RUPM) tahun 2016-2015				
	Promosi Penanaman Modal	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
1	Booklet potensi peluang investasi Kabupaten Balangan 2018	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
2	Brosur potensi parawisata Kabupaten Balangan	Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
	Seksi Pengaduan dan Informasi				
1	Laporan Pengaduan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
2	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
	Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan				
-	Draf Perda / NSPK (Norma Standar Prosedur Kebijakan)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
	Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan				
-	Rekap Izin	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
A	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN				
1	Seksi Pelayanan Perizinan Jasa Usaha	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
a	Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data, pelayanan perizinan jasa usaha	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
b	Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyusun jenis-jenis pelayanan administrasi perizinan jasa usaha, standar operasional	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
c	Melaksanakan kegiatan teknis penantian dan evaluasi proses pemberian pelayanan administrasi perizinan jasa usaha sesuai	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
d	Membuat dan memelihara daftar induk wajib retribusi dan menerbitkan NPWRD	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan
e	Melaksanakan perhitungan dan penerbitan surat ketetapan retribusi daerah (SKPD)	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
B	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 2 Seksi Pelayanan Perizinan Tertentu a Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data, pelayanan perizinan jasa usaha b Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyusun jenis-jenis pelayanan administrasi perizinan jasa usaha, standar operasional prosedur, mekanisme dan persyaratannya serta dukungan perangkat dukung sebagai dasar pelaksanaan proses c Melaksanakan kegiatan teknis, penataan dan evaluasi proses pemberian pelayanan administrasi perizinan jasa usaha sesuai dengan mekanisme prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan d Membuat dan memelihara Daftar Induk wajib retribusi dan menerbitkan NPWRD e Melaksanakan perhitungan dan penerbitan surat ketetapan Retribusi Daerah	Biasa Biasa Biasa Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan DPMPTSP Kab. Balangan DPMPTSP Kab. Balangan DPMPTSP Kab. Balangan DPMPTSP Kab. Balangan
C	BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN 3 Seksi, Tinjau Lapangan, Pemantauan dan Pengawasan Perizinan a Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data, peninjauan lapangan, pemantauan dan pengawasan perizinan b Menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyusun jenis-jenis pelayanan administrasi, tinjau lapangan pemantauan dan pengawasan perizinan, sop, mekanisme dan persyaratannya serta dukungan perangkat hukum sebagai dasar pelaksanaannya c Melaksanakan kegiatan teknis pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan administrasi tinjau lapangan, pemantauan dan pengawasan perizinan sesuai dengan mekanisme prosedur serta persyaratan yang harus ditentukan	Biasa Biasa Biasa	Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMPTSP Kab. Balangan DPMPTSP Kab. Balangan DPMPTSP Kab. Balangan
VII	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP				
1	KEBLAKAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DLH Kab. Balangan
2	TATA LINGKUNGAN A Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 1) Evaluasi pemanfaatan sumber daya alam (a) Evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam (b) Kebijakan pemanfaatan sumber daya alam	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DLH Kab. Balangan DLH Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
3	B Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor 1) Perencanaan lingkungan hidup C Dampak Lingkungan 1) Penerapan sistem kajian dampak lingkungan (a) Penilaian dokumen lingkungan (b) Pemeriksaan dokumen lingkungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DLH Kab. Balangan
	PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN A Pemantauan dan Pengawasan 1) Manufaktur, prasarana dan jasa (a) Industri kimia (b) Industri logam, elektronik dan mesin (c) Aneka industri (d) Prasarana dan jasa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DLH Kab. Balangan
	2) Pertambangan, energi, minyak dan gas PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERUBAHAN IKLIM A Kerusakan Ekosistem Perairan Darat 1) Kerusakan ekosistem (a) Sungai (b) Kerusakan ekosistem (c) Pengelolaan kualitas air	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DLH Kab. Balangan
4	2) Danau (a) Pengendalian kerusakan ekosistem (b) Pengelolaan kualitas air	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DLH Kab. Balangan
	3) Rawa (a) Rawa gambut (b) Rawa bukan gambut	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DLH Kab. Balangan
	B Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfer 1) Perangkat mitigasi 2) Inventarisasi emisi gas rumah kaca (a) Laporan inventarisasi GRK nasional (b) Data bidang inventarisasi GRK	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DLH Kab. Balangan
	3) Pengendalian bahan perusak ozon (a) Surat rekomendasi kepada importir terdaftar dan bahan perusak ozon (b) Hibah bantuan luar negeri terkait program perlindungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DLH Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	lapisan ozon				
	4) Pengendalian kerusakan akibat kebakaran hutan dan lahan				
	C Adaptasi Perubahan Iklim				
	1) Perangkat adaptasi perubahan iklim				
	(a) Pengembangan perangkat adaptasi perubahan iklim				
	(b) Pemantauan dan evaluasi adaptasi perubahan iklim				
	2) Kerentanan perubahan iklim				
	(a) Identifikasi dan analisis kerentanan perubahan iklim				
	(b) Media klining kerentanan perubahan iklim				
	PENGLOLAAN E3, LIMBAH DAN SAMPAH				
5	A Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DLH Kab. Balangan
	1) Registrasi dan notifikasi				
	(a) Registrasi				
	(b) Notifikasi				
	2) Pemantauan				
	(a) Sektor industri				
	(b) Sektor non industri				
	3) Evaluasi dan tindak lanjut				
	(a) Sektor industri				
	(b) Sektor non industri				
	B Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DLH Kab. Balangan
	1) Pengumpulan dan pemanfaatan				
	2) Pengangkutan dan pengolahan				
	3) Penimbunan dan dumping				
	4) Notifikasi dan rekomendasi limbah lintas batas				
	(a) Notifikasi				
	(b) Rekomendasi limbah lintas batas				
	C Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DLH Kab. Balangan
	1) Tanggap darurat dan pemulihan kontaminasi				
	(a) Pertambangan, energi dan minyak, gas				
	(b) Manufaktur				
	(c) Agroindustri				
	(d) Prasarana, jasa dan Non Institusi				
	D Pengelolaan Sampah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	DLH

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2 1) Daur ulang dan pemanfaatan sampah tps 3e + Bank sampah	3	4	5 kinerja Pemerintah Kab. Balangan	6 Kab. Balangan
6	HUKUM LINGKUNGAN A Hukum Administrasi Lingkungan 1) Pengelolaan dan pengembangan pengaduan (a) Pengelolaan pengaduan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DLH Kab. Balangan
7	KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT A Komunikasi Lingkungan 1) Pengembangan Komunikasi (a) Program komunikasi (b) Evaluasi komunikasi 2) Publikasi dan kampanye (a) Publikasi (b) Kampanye B Penguatan Inisiatif Masyarakat 1) Komunitas pendidikan lingkungan (a) Pengembangan dan bimbingan (b) Evaluasi 2) Kearifan lingkungan (a) Inventarisasi (b) Revitalisasi C Peningkatan Peran Masyarakat 1) Masyarakat perkotaan (a) Masyarakat kawasan permukiman (b) Masyarakat kawasan rentan 2) Masyarakat Pedesaan (a) Masyarakat petani (b) Masyarakat nelayan D Peningkatan Peran Organisasi Masyarakat 1) Organisasi sosial dan masyarakat 2) Organisasi profesi dan dunia usaha	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DLH Kab. Balangan
8	PEMBINAAN SARANA TEKNIK LINGKUNGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS A Data dan Informasi Lingkungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	DLH Kab. Balangan

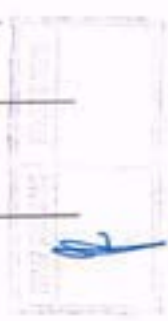
A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	1) Pengelolaan data (a) Pengumpulan dan pengelolaan data (b) Manajemen basis data 2) Pengelolaan Informasi (a) Analisis data dan penyajian informasi (b) Perpustakaan 3) Pengembangan Perangkat Lunak (a) Pengembangan instrumen layanan informasi (b) Pengembangan instrumen analisis data 4) Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Jaringan (a) Pengembangan sistem jaringan (b) Pemeliharaan jaringan B Kelembagaan Lingkungan 1) Kelembagaan dan tata laksana (a) Pengembangan kelembagaan (b) Tata laksana 2) Fasilitatif standar pelayanan minimal (a) Fasilitasi standar pelayanan minimal daerah Provinsi (b) Fasilitasi standar pelayanan minimal daerah Kabupaten/Kota C Standarisasi dan Teknologi 1) Standarisasi manajemen dan pengujian lingkungan (a) Perangkat manajemen lingkungan (b) Pengujian lingkungan 2) Standarisasi kompetensi keahlian dan lembaga penyedia jasa lingkungan (a) Kompetensi keahlian lingkungan (b) Kompetensi lembaga penyedia jasa lingkungan 3) Teknologi ramah lingkungan (a) Pengembangan kriteria teknologi ramah lingkungan (b) Verifikasi teknologi ramah lingkungan D Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan 1) Pemantauan dan kajian kualitas lingkungan (a) Pemantauan kualitas lingkungan (b) Kajian kualitas lingkungan 2) Laboratorium rujukan dan pengujian				
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DLH Kab. Balangan
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DLH Kab. Balangan
		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DLH Kab. Balangan



A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(1) Tata laksana Koperasi (a) Tata laksana Koperasi Primer (b) Tata laksana Koperasi Sekunder (2) Tata laksana Usaha Kecil dan Menengah (a) Tata laksana Usaha Kecil (b) Tata laksana Usaha Mengah (3) Klasifikasi Koperasi dan UKM (a) Klasifikasi Koperasi (b) Klasifikasi UKM			kinerja Pemerintah Kab. Balangan	dan Perindustrian Kab. Balangan
D	Keunggulan Koperasi (1) Partisipasi Usaha dan Permodalan (a) Partisipasi Usaha (b) Partisipasi Permodalan (c) Simpanan Koperasi (2) Partisipasi Pengawasan (a) Rapat Anggota (b) Pengawasan (3) Pengembangan Anggota (a) Kaderisasi (b) Penyuluhan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
E	Pengendalian dan Akuntabilitas (1) Pengendalian (a) Pengendalian Intern (b) Tidak Lanjut Hasil Pengendalian (2) Bidang Akuntabilitas dan Akuntansi (a) Akuntabilitas (b) Akuntansi dan Audit (3) Monitoring dan Evaluasi (a) Monitoring (b) Evaluasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
4	PRODUKSI - A Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 1) Tanaman Pangan (a) Padi (b) Pakawija	Biasa/Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan



A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	2) Hortikultura (a) Buah- buahan dan Tanaman Obat (b) Tanaman Hias dan Sayur 3) Sarana (a) Sarana Produksi (b) Sarana Pengolahan B Kehutanan dan Perkebunan 1) Kehutanan (a) Hutan Produksi (b) Hutan Kemasyarakatan 2) Perkebunan (a) Tanaman Semusim dan Rempah - rempah (b) Tanaman Keras 3) Sarana (a) Sarana Produksi (b) Sarana Pengolahan C Perikanan dan Peternakan 1) Perikanan (a) Perikanan Tangkap/Perikanan Laut (b) Perikanan Budidaya/Perikanan Darat 2) Peternakan (a) Ternak Besar (b) Ternak Kecil 3) Sarana (a) Sarana Produksi (b) Sarana Pengolahan (c) Pengolahan Hasil Perikanan (d) Pengolahan Hasil Peternakan D Industri Kerajinan dan Pertambangan 1) Industri (a) Sandang, Logam dan Elektronika (b) Pangan, Kimia dan Aneka 2) Kerajinan (a) Logam (b) Non Logam	Biasa/Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
		Biasa/Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
		Biasa/Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	3) Pertambangan dan Migas (a) Pertambangan Umum (b) Pertambangan Migas 4) Jasa dan Aneka Usaha (a) Jasa (b) Aneka Usaha E Ketenaga Listrik dan Aneka Usaha 1) Ketenaga Listrik dan Konstruksi (a) Listrik (b) Konstruksi 2) Aneka Usaha (a) Jasa Umum (b) Angkutan 3) Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (a) Pariwisata (b) Pos dan Telekomunikasi	Biasa/Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
5	PEMBAYARAN A Program Pendanaan (1) Program Pendanaan Jangka Pendek (a) Program Pendanaan Koperasi Jangka Pendek (b) Program Pendanaan UKM Jangka Pendek (2) Program Pendanaan Jangka Menengah dan Panjang (a) Program Pendanaan Koperasi Jangka Menengah dan Panjang (b) Program Pendanaan UKM Jangka Menengah dan Panjang (3) Program Pendanaan Usaha Mikro dan Dana Bergulir (a) Program Pendanaan Usaha Mikro (b) Program Pendanaan Dana Bergulir B Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam (1) Pengembangan dan Pengendalian KSP (a) Pengembangan Kelembagaan KSP (b) Pengendalian Kelembagaan KSP (2) Pengembangan dan Pengendalian USP Koperasi (a) Pengembangan USP Koperasi (b) Pengendalian USP Koperasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
C	(3) Pengembangan dan Pengendalian USP-LKM (a) Pengembangan USP-LKM (b) Pengendalian USP-LKM Urusan Permodalan (1) Pengembangan Permodalan Sendiri (a) Permodalan Sendiri Koperasi (b) Permodalan Sendiri UKM (2) Pengembangan Permodalan Luar (a) Permodalan Bank (b) Permodalan Non Bank (3) Pengembangan Kredit Program (a) Kredit Program Bank (b) Kredit Program Non Bank Asuransi dan Jasa Keuangan (1) Asuransi (a) Asuransi Koperasi (b) Asuransi UKM (2) Perpejakan (a) Perpejakan Koperasi (b) Perpejakan UKM (3) Jasa Keuangan dan Kredit Komersial (a) Jasa Keuangan dan Kredit Komersial Bank (b) Jasa Keuangan dan Kredit Non Komersial Bank E. Pembiayaan dan Penjaminan Kredit (1) Lembaga Pembiayaan (a) Modal Ventura (b) Sewa Guna Usaha dan Anak Piutang (2) Penjamin Kredit (a) Penjamin (b) Asuransi Kredit (3) Pasar Modal (a) Obligasi (b) Modal Penyertaan F. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB) (1) Pengembangan Potensi Pemasaran	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
D		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
E		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
F		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
6	(a) Pengembangan Potensi Pemասարան Koperasi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
	(b) Pengembangan Potensi Pemասարան UKM				
	G. Data Keuangan IKM (Industri Kecil Menengah)				
	PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA				
	A. Kemitraan dan Jaringan Usaha				
	(1) Kemitraan				
	(a) Kemitraan Koperasi				
	(b) Kemitraan UKM				
	(2) Jaringan Usaha				
	(a) Jaringan Usaha Koperasi				
7	(b) Jaringan Usaha UKM	Biasa / Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
	(3) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan				
	(a) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan Koperasi				
	(b) Pengembangan Kerja sama Kelembagaan UKM				
	B. Informasi dan Publikasi Bisnis				
	(1) Pengumpulan Informasi				
	(a) Pengumpulan Informasi Koperasi				
	(b) Pengumpulan Informasi UKM				
	(2) Pengolahan Informasi				
	(a) Pengolahan Informasi Koperasi				
7	(b) Pengolahan Informasi UKM	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
	(3) Publikasi dan Promosi				
	(a) Publikasi dan Promosi Koperasi				
	(b) Publikasi dan Promosi UKM				
	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				
	A. Pengembangan Kewirausahaan				
	(1) Lembaga Kewirausahaan				
	(a) Pengembangan Jaringan Kewirausahaan				
	(b) Peningkatan Sumber Daya Kewirausahaan				
	(2) Penumbuhan Kewirausahaan				
7	(a) Peningkatan Kemampuan Kewirausahaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
	(b) Evaluasi Kewirausahaan				
	Sosialisasi Kewirausahaan				
	(3) Perangkat Lunak				
	(a) Perangkat Lunak				

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(b) - Promosi Kewirausahaan				
B	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM (1) Diklat Formal dan Informal (a) Diklat Formal (b) Diklat Informal (2) Diklat Non Formal (a) Perangkat Lunak (b) Sarana dan Prasarana Diklat (3) Kerjasama Lembaga Diklat (a) Hubungan Lembaga Diklat Pemerintah (b) Hubungan Lembaga Diklat Non Pemerintah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
C	Peran Serta Masyarakat (1) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi dan UKM (a) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap Koperasi (b) Peningkatan Dukungan Media Massa terhadap UKM (2) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi dan UKM (a) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap Koperasi (b) Peningkatan Dukungan LSM Terhadap UKM (3) Peningkatan Dukungan Organisasi Profesi (a) Dukungan Organisasi Profesi terhadap Koperasi (b) Dukungan Organisasi Profesi terhadap UKM Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM (1) Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM (a) Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi (b) Monitoring dan Evaluasi Diklat UKM (2) Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal dan Informal (a) Monitoring dan Evaluasi Diklat Formal (b) Monitoring dan Evaluasi Diklat Informal (3) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat (a) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Pemerintah (b) Monitoring dan Evaluasi Lembaga Diklat Non Pemerintah	Biasa/Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
D		Biasa/Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
8	PENGEMBANGAN DAN RESTRUKTURISASI USAHA A. Produktifitas dan Mutu (1) Produktifitas (a) - Inkubator Teknologi (b) - Pengembangan Klaster (2) Peningkatan Mutu (a) - Disain (b) - Standarisasi (3) Sertifikasi Produk (a) - Sertifikasi (b) - Label dan Merek B Restrukturisasi Usaha (1) Restrukturisasi Manajemen (a) - Manajemen Koperasi (b) - Manajemen UKM (2) Restrukturisasi Pendanaan (a) - Pendanaan Koperasi (b) - Pendanaan UKM (3) Restrukturisasi Kelembagaan (a) - Restrukturisasi Kelembagaan Koperasi (b) - Restrukturisasi Kelembagaan UKM C Fasilitasi Investasi UKM (1) Investasi Klaster UKM (a) Fasilitasi Investasi UKM Agro Bisnis (b) Fasilitasi Investasi UKM Non Agro Bisnis (2) Pengembangan Kerja Sama Investasi Usaha (a) Pengembangan Pangan (b) Pengembangan Non Pangan (3) Fasilitas Investasi Aneka Usaha UKM (a) Fasilitasi Investasi Usaha Koperasi (b) Fasilitasi Investasi Usaha UKM	Biasa/Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
		Biasa/Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
9	PENGKAJIAN SUMBER DAYA UKM A Penelitian Koperasi (1) Perencanaan dan Pengendalian (a) Perencanaan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
B	(b) Evaluasi dan Pelaporan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
	(2) Penyelenggaraan				
	(a) Kelembagaan Koperasi				
	(b) Bisnis Koperasi				
	(3) Tata Laksana Penelitian				
	(a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi				
	(b) Sarana dan Prasarana				
	Penelitian UKM				
	(1) Perencanaan dan Pengendalian				
	(a) Perencanaan				
C	(b) Evaluasi dan Pelaporan	Biasa /Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
	(2) Penyelenggaraan				
	(a) Kelembagaan UKM				
	(b) Bisnis UKM				
	(3) Tata Laksana Penelitian				
	(a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi				
	(b) Sarana dan Prasarana				
	Penelitian Sumber Daya				
	(1) Perencanaan dan Pengendalian				
	(a) Perencanaan				
D	(b) Evaluasi dan Pelaporan	Biasa /Terbatas	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
	(2) Penyelenggaraan				
	(a) Sumber Daya Manusia				
	(b) Pembinaan				
	(3) Tata Laksana Penelitian				
	(a) Temu Ilmiah dan Pengembangan Metodologi				
	(b) Sarana dan Prasarana				
	Pengembangan Perkaderan UMK				
	(1) Penyuluhan				
	(a) Penyelenggaraan				
	(b) Materi Penyuluhan				
	(2) Perkaderan				
	(a) Penilaian				
	(b) Pengembangan				
	(3) Kerja Sama dan Jaringan				

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(a) Lembaga Pemerintah (b) Lembaga Non Pemerintah				
1	URUSAN PERINDUSTRIAN SARANA DAN PRASARANA Meliputi pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
2	PENINGKATAN PRODUKSI Meliputi bahan baku, bahan penolong, bahan penunjang dan teknologi tepat guna	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
3	PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PENYULUHAN DAN MONITORING PERINDUSTRIAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
4	BANTUAN a. Modal/dana rangsangan bagi kelompok industri dan kerajinan rakyat b. Peralatan industri dan kerajinan c. Konsultan/Tenaga ahli	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
5	DAFTAR INVENTARISASI MENURUT JENIS INDUSTRI Meliputi industri berat, industri sandang, industri ringan, industri logam, industri sedang, industri pangan, industri obat - obat dan aneka industri lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
6	STANDAR MUTU HASIL PRODUKSI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
7	PENGAJUAN HAK MERKA, CIPTA, PATEN, DESAIN YANG MASIH DALAM PROSES KEMENKUMHAM	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
8	PEMASARAN HASIL PRODUKSI Meliputi promosi hasil, perlindungan hasil industri, penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau dan pemasaran luar negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
9	DATA DAN STATISTIK BIDANG PERINDUSTRIAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kab. Balangan
IX	URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA				

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOJAH
1	2	3	4	5	6
1	KEBLAKAKAN Kebijakan penanggulangan bencana meliputi kebijakan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan pelatihan PENGECAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab. Balangan	BPPD Kab Balangan
2	A Pengurangan Resiko Bencana 1) Pencegahan (a) Pengkajian resiko (b) Pengelolaan Resiko 2) Mitigasi (a) Mitigasi struktur (b) Mitigasi Non struktur B Pemberdayaan Masyarakat 1) Peran lembaga usaha (a) Usaha padat modal (b) Usaha padat karya 2) Peran organisasi sosial masyarakat (a) Organisasi internasional (b) Organisasi sosial masyarakat internasional 3) Peran masyarakat (a) Peningkatan kesadaran masyarakat (b) Peningkatan ketahanan masyarakat C Kesiapsiagaan 1) Peringatan dini (a) Pemetaan sistem jaringan (b) Pemantauan dan peringatan (c) Peta rawan bencana 2) Perencanaan siaga (a) Kebutuhan dan potensi sumber daya (b) Penerapan rencana strategis 3) Penyediaan sumber daya (a) Penyediaan dan persiapan sumber daya (b) Pengendalian	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab. Balangan	BPPD Kab Balangan
3	PENANGANAN DARURAT A. Tanggap Darurat 1) Perencanaan darurat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab. Balangan	BPPD Kab Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
1	(a) Pendataan darurat (b) Perencanaan operasi 2) Pengendalian operasi (a) Pengorganisasian pos komando (b) Sarana dan prasarana pos komando 3) Penyelamatan dan evakuasi (a) Penyelamatan (b) Evakuasi	Biasa/Tertuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab. Balangan	BPBD Kab Balangan
	B Bantuan Darurat				
	1) Bantuan serdang pangan (a) Bantuan serdang (b) Bantuan pangan				
	2) Bantuan kesehatan dan air bersih (a) Bantuan kesehatan (b) Bantuan air bersih				
	3) Bantuan hunian sementara (a) Pembangunan hunian sementara (b) Pendukung hunian sementara				
	C Perbaikan darurat				
	1) Pembersihan lingkungan (a) Penyipaan peralatan (b) Angkutan				
	2) Perbaikan sarana vital (a) Prasarana sosial (b) Prasarana ekonomi				
	3) Pemantauan dan pelaporan (a) Pemantauan (b) Pelaporan				
	4 REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI				
	A Penilaian Kerusakan				
	1) Inventarisasi kerusakan (a) Inventarisasi fisik (b) Inventarisasi sosial ekonomi				
	2) Estimasi pembiayaan (a) Estimasi pembiayaan pembangunan				

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOJAH
1	2	3	4	5	6
5	B Pemulihan dan Peningkatan Psikik 1) Rehabilitasi rekonstruksi fasilitas umum (a) Rehabilitasi fasilitas umum (b) Rekonstruksi fasilitas umum 2) Rehabilitasi rekonstruksi fasilitas sosial (a) Rehabilitasi fasilitas sosial (b) Rekonstruksi fasilitas sosial 3) Rehabilitasi rekonstruksi perumahan (a) Rehabilitasi rekonstruksi berat (b) Rehabilitasi rekonstruksi ringan	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab. Balangan	BPPD Kab Balangan
	C Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi 1) Pemulihan dan peningkatan sosial budaya (a) Pemulihan dan peningkatan sosial budaya (b) Pemulihan dan peningkatan sosial kesehatan 2) Pemulihan dan peningkatan ekonomi (a) Pemulihan ekonomi (b) Peningkatan ekonomi	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab. Balangan	BPPD Kab Balangan
	D Penanganan Pengungsi 1) Data identitas korban bencana (a) Di pengungsian (b) Meninggal dunia 2) Perlindungan dan pemberdayaan pengungsi (a) Perlindungan pengungsi (b) Pemberdayaan pengungsi 3) Kompetensi dan pemberkahan hak pengungsi (a) Kompetensi (b) Pengembangan hak 4) Penempatan pengungsi (a) Pemukiman dan repatriasi (b) Relokasi/Pengalihan	Tertbatas	Eseelon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	BPPD Kab Balangan
		Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab. Balangan	BPPD Kab Balangan
		Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab. Balangan	BPPD Kab Balangan
		Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab. Balangan	BPPD Kab Balangan
		Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab. Balangan	BPPD Kab Balangan
		Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab. Balangan	BPPD Kab Balangan
		Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab. Balangan	BPPD Kab Balangan
		Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab. Balangan	BPPD Kab Balangan
		Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab. Balangan	BPPD Kab Balangan
		Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab. Balangan	BPPD Kab Balangan
		Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab. Balangan	BPPD Kab Balangan
		Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab. Balangan	BPPD Kab Balangan
		Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab. Balangan	BPPD Kab Balangan
		Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Kab. Balangan	BPPD Kab Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
4	PERLINDUNGAN ANAK (IAK SIPIL, MASALAH SOSIAL, KEKERASAN TERHADAP ANAK, ANAK BERKEBUTUHAN) A Data Perlindungan Anak B Advokasi dan Fasilitas C Monitoring, Evaluasi dan Analisis Kebijakan Perlindungan Anak	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPPPA Kab. Balangan
5	IDENTITAS SAKSI DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DPPPA Kab. Balangan
6	IDENTIFIKASI ANAK BERMASALAH DENGAN HUKUM	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DPPPA Kab. Balangan
7	IDENTIFIKASI SAKSI, PELAKU, PELAPOR DAN SAKSI AHLI	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DPPPA Kab. Balangan
8	TEMPAT PERLINDUNGAN KORBAN	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DPPPA Kab. Balangan
9	TUMBUH KEMBANG ANAK (PENDIDIKAN, KESEHATAN, PARTISIPASI, LINGKUNGAN DAN PENANAMAN NILAI) A Data Tumbuh Kembang Anak B Advokasi dan Fasilitas C Monitoring, Evaluasi dan Analisis Kebijakan Tumbuh Kembang Anak	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPPPA Kab. Balangan
XI	URUSAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
1	Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meliputi kebijakan dibidang 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyajian kebijakan 3 Pertunusan dan penyusunan bahan 4 Pembertian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penerapan dalam bentuk NSPK	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISPAR Kab. Balangan
2	Pengembangan destinasi pariwisata A. Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata (1) Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (Kawasan Strategis Pariwisata) (2) Kawasan Pengembangan Destinasi Pariwisata (Perancangan Destinasi Pariwisata) (3) Pengembangan Zona Kreatif	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISPAR Kab. Balangan DISPAR Kab. Balangan DISPAR Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(a) Zona Kreatif Berbasis Seni dan Budaya (b) Zona Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK	Biasa/Terbuka	Eselon IV	kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Kab. Balangan
	(4) Investasi Pariwisata				
	(a) Pengembangan Potensi Investasi				
	(b) Promosi Investasi				
	(c) Pengembangan Objek Vital Nasional				
	B. Pengembangan Daya Tarik Wisata	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISPAR Kab. Balangan
	(1) Buntek Daya Tarik Wisata				
	(2) Fasilitas Pengembangan Daya Tarik Wisata				
	(3) Pengembangan Daya Tarik Wisata Kota Pusaka				
	(4) Penilaian Kelayakan Tugas Pembantuan				
	(5) Pengembangan Pengelolaan Daya Tarik Wisata (Cipta Award)				
	C. Industri Pariwisata	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISPAR Kab. Balangan
	(1) Sarana Pariwisata				
	(a) usaha daya tarik wisata dan kawasan pariwisata				
	(b) penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, serta tirta dan spa.				
	(c) Sertifikasi pengembangan dan SDM industri pariwisata				
	(d) Pengembangan industri pariwisata	Terbatas	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DISPAR Kab. Balangan
	(2) Jasa Pariwisata:				
	(a) jasa transportasi wisata				
	(b) jasa informasi pariwisata				
	(c) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi				
	(d) jasa perjalanan wisata				
	(e) jasa konsultan pariwisata				
	(f) jasa pariwisata dan penyelenggaraan pertemuan				
	(g) insentif				
	(h) konvensi				
	(i) pameran				
(3)	Pengembangan Produk dan Pelayanan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISPAR Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOMOKAN
1	2	3	4	5	6
3	D. Pembedayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata (1) Kemiripan dan Keterkaitan Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	E. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event (1) Pengembangan Wisata Kulder dan Belanja (2) Pengembangan Rekreasi dan Hiburan (a) Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan (b) Pengembangan Wisata Olah Raga (3) Pengembangan Wisata Alam dan Budaya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISPAR Kab. Balangan
	3 PEMASARAN PARIWISATA				
	A. Pengembangan pasar dan informasi pariwisata (1) Informasi Pasar Dalam Negeri (a) Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri (b) Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri (2) Informasi Pasar Luar Negeri (a) Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri (b) Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri (3) Hubungan Lembaga Pariwisata dan (a) Hubungan Lembaga Pariwisata (4) Perencanaan Pemasaran Pariwisata (a) Perencanaan Pemasaran Dalam Negeri (b) Perencanaan Pemasaran Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISPAR Kab. Balangan
	B. Promosi pariwisata luar negeri (1) Wilayah ASEAN (2) Wilayah Asia (3) Wilayah Eropa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISPAR Kab. Balangan
	C. Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISPAR Kab. Balangan
	D. Pencitraan Indonesia (1) Strategi Pencitraan Indonesia (a) Perencanaan Pencitraan Indonesia (2) Komunikasi Media Cetak, Media Elektronik dan Digital, dan Media Ruang (a) Promosi Media (b) Sarana dan Distribusi Media	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISPAR Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	ILAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
3	D. Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata (1) Kemiripan dan Kelembagaan Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	E. Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event (1) Pengembangan Wisata Kultur dan Belanja (2) Pengembangan Rekreasi dan Hiburan (a) Pengembangan Wisata Spa dan Kesehatan (b) Pengembangan Wisata Olah Raga (3) Pengembangan Wisata Alam dan Budaya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISPAR Kab. Balangan
	3 PEMASARAN PARIWISATA				
	A. Pengembangan pasar dan informasi pariwisata (1) Informasi Pasar Dalam Negeri (a) Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri (b) Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Dalam Negeri (2) Informasi Pasar Luar Negeri (a) Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri (b) Diseminasi Informasi Pasar Pariwisata Luar Negeri (3) Hubungan Lembaga Pariwisata dan (a) Hubungan Lembaga Pariwisata (4) Perancangan Pemasaran Pariwisata (a) Perancangan Pemasaran Dalam Negeri (b) Perancangan Pemasaran Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISPAR Kab. Balangan
	B. Promosi pariwisata luar negeri (1) Wilayah ASEAN (2) Wilayah Asia (3) Wilayah Eropa C. Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISPAR Kab. Balangan
	D. Pencitraan Indonesia (1) Strategi Pencitraan Indonesia (a) Perencanaan Pencitraan Indonesia (2) Komunikasi Media Cetak, Media Elektronik dan Digital, dan Media Ruang (a) Promosi Media (b) Sarana dan Distribusi Media	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISPAR Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
XII	(2) Pengembangan Karya Kreatif Periklanan (a) Iklan Cetak (b) Iklan Elektronik	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISPAR Kab. Balangan
	B. Desain dan Arsitektur (1) Komunikasi Visual (a) Komunikasi Visual (2) Desain Produk dan Kemasan (3) Mode (a) Desain Busana (b) Desain Non Busana				
	C. Kerjasama dan Fasilitas (1) Lisensi Teknologi (a) Pemanfaatan Teknologi (2) Sentra Inovasi dan (a) Pengembangan Sentra Inovasi (3) Sentra Kreatif (a) Pengolahan Sentra Kreatif (4) Akses Pembiayaan (a) Akses Pembiayaan Non Bank (b) Akses Pembiayaan Non Bank				
	6. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
	A. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata				
	(1) Program dan Evaluasi (2) Data dan Publikasi				
	B. Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif (1) Program dan Evaluasi (2) Data dan Publikasi				
	C. Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (1) Program dan Evaluasi (2) Penyelenggaraan dan Kerjasama				
	D. Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (1) Program dan Evaluasi (2) Evaluasi dan Kerjasama				
	URUSAN SOSIAL				

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	LUAS AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
3	4) Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Sosial Kab. Balangan
	D Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA	Biasa/Terbuka		Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Sosial Kab. Balangan
	1) Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat			Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Sosial Kab. Balangan
	2) Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam institusi dan luar institusi	Terbatas	Eselon III		
	E Pelayanan sosial lanjut usia				
	1) Pelayanan sosial dalam dan luar panti	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Sosial Kab. Balangan
	2) Pengembangan kelembagaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	a. Pembinaan lembaga				
	b. Kerjasama lembaga				
	3) Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Sosial Kab. Balangan
3	Perlindungan dan Jaminan Sosial				
	A Pengumpulan dan pengumpulan sumber dana bantuan sosial				
	1) Bimbingan dan standarisasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Sosial Kab. Balangan
	2) Pelatihan dan pengumpulan				
	B Perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Sosial Kab. Balangan
	C Perlindungan sosial korban bencana sosial				
	1) Ketahanan sosial masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Sosial Kab. Balangan
	a. Ketahanan sosial				
	b. Penguatan sumber daya				
	2) Tanggap darurat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Sosial Kab. Balangan
3	a. Bantuan darurat				
	b. Advokasi sosial				
	3) Pemulihan sosial	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Sosial Kab. Balangan
	a. Penguatan sosial				
	b. Reintegrasi sosial				
	4) Kerjasama	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Sosial Kab. Balangan
	a. Kerjasama Pemerintah				

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	LEAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
4	D. Kerjasama Non Pemerintah Perlindungan sosial korban bencana alam 1) Kesiapsiagaan dan mitigasi 2) Tanggap darurat a. Bantuan darurat b. Advokasi sosial 3) Pemulihan sosial dan penguatan sosial 4) Kerjasama a. Kerjasama Pemerintah b. Kerjasama Non Pemerintah E. Jaminan sosial 1) Seleksi dan verifikasi 2. Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan a. Pendampingan b. Penyelurusan 3) Kerjasama a. Kerjasama Pemerintah b. Kerjasama Non Pemerintah Pemberdayaan Sosial dan Penguatan Kemiskinan A. Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial 1) Ketahanan keluarga a. Bimbingan kesejahteraan sosial keluarga b. Konsultasi dan Advokasi keluarga 2) Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial 3) Kemitraan dunia usaha a. Kerjasama b. Bimbingan sosial 4) Karang taruna a. Kelembagaan b. Pengembangan kapasitas B. Pemberdayaan komunitas adat terpencil 1) Persiapan pemberdayaan a. Identifikasi b. Analisis 2) Pemberdayaan sumber daya manusia	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eseelon IV Eseelon IV Eseelon IV Eseelon IV Eseelon IV Eseelon IV Eseelon IV Eseelon IV Eseelon IV Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Sosial Kab. Balangan Dinas Sosial Kab. Balangan Dinas Sosial Kab. Balangan Dinas Sosial Kab. Balangan Dinas Sosial Kab. Balangan Dinas Sosial Kab. Balangan Dinas Sosial Kab. Balangan Dinas Sosial Kab. Balangan Dinas Sosial Kab. Balangan Dinas Sosial Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PEKTIHINGANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	a. Pemberdayaan sumber daya manusia adat terpencil b. Pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Kab. Balangan
	3) Penggalian dan pengembangan potensi a. Penggalian potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan b. Pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Sosial Kab. Balangan
	4) Keceratan dan penguatan komunikasi adat terpencil a. Keceratan sosial b. Penguatan sosial	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Sosial Kab. Balangan
	5) Kerjasama kembangan a. Kerjasama kembangan b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Sosial Kab. Balangan
	C Penguatan kembangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan 1) Identifikasi dan analisis 2) Pengembangan kapasitas a. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia b. Pengembangan kapasitas usaha	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Sosial Kab. Balangan
	D Kepahlawanan, kepertinisan dan keselamatan sosial 1) Penghargaan dan keselamatan keluarga pahlawan a. Penghargaan b. Penghargaan c. Keselamatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Sosial Kab. Balangan
	2) Pelestarian nilai - nilai kepahlawanan dan kepertinisan a. Identifikasi b. Penyelenggaraan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Sosial Kab. Balangan
	3) Pengembangan keselamatan sosial a. Penghargaan nilai b. Pelestarian nilai	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Sosial Kab. Balangan
	4) Pengembangan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional a. Pengembangan taman makam pahlawan nasional utama b. Standardisasi taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Sosial Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
XIII	URUSAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI				
	A. PERUMUSAN KEBIJAKAN Kebijakan di bidang Perencanaan Tenaga Kerja, Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja.	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
	B. PERENCANAAN TENAGA KERJA 1. Perencanaan Tenaga Kerja Makro 1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
	2. Perencanaan Tenaga Kerja Mikro a. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah 1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah 2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah 3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah b. Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta 1) Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Swasta 2) Pembinaan dan Pemantauan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta 3) Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
	C. PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS 1. Standartisasi Kompetensi dan Program Pelatihan a. Pengembangan Standartisasi Kompetensi 1) Penerapan Standar Kompetensi 2) Bimbingan Penerapan Standar Kompetensi 3) Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan Program Pelatihan Ketenagakerjaan Penyusunan Materi Pelatihan Ketenagakerjaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
4)	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan				
	Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan				
	Penyusunan Materi Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan				
	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian				
	Program Pelatihan Ketransmigrasian				
	Penyusunan Materi Pelatihan Ketransmigrasian				
	Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja				
	1) Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan				
	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja				
	Pengembangan Sistem Informasi Kelembagaan				
	2) Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan				
	Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan				
	Bimbingan Pengelolaan Sarana dan Fasilitas				
3)	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan	Bisa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTRANS Kab. Balangan
4)	Standar Mutu Lembaga Pelatihan				
c.	Bimbingan Penerapan Standar Mutu				
	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga				
	Sistem Pendanaan Pelatihan				
	Kerjasama Antar Lembaga				
	Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan				
	1) Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah				
	Peningkatan Kompetensi Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah				
	Pengembangan Karir Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah				
	2) Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta				
	Peningkatan Kompetensi Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta				
	Pengembangan Karir Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta				
3)	Tenaga Pelatihan				
4)	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelatihan				
	Pengembangan Karir Tenaga Pelatihan				
	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan				
	Registrasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan				

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
1	a. Informasi Pasar Kerja	Biasa/Tertulis	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
	1) Informasi Pasar Kerja Dalam Negeri				
	2) Informasi Pasar Kerja Luar Negeri				
	b. Analisis Pasar Kerja				
	1) Analisis Pasar Kerja Dalam Negeri				
	2) Analisis Pasar Kerja Luar Negeri				
	c. Bursa Kerja				
	1) Bursa Kerja Dalam Negeri				
	2) Bursa Kerja Luar Negeri				
	d. Analisis Jabatan				
	1) Analisis dan Informasi Jabatan				
	2) Pengembangan Sistem Analisis Jabatan				
	2. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri				
	a. Antar Kerja				
	1) Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) / Antar Kerja Lokal (AKL)				
	2) Kelengkapan Penempatan Tenaga Kerja				
	b. Penempatan Tenaga Kerja Khusus				
	1) Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita				
	2) Penempatan Tenaga Kerja Khusus Penyandang Cacat dan Lansia				
	c. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				
	1) Penyuluhan Jabatan				
	2) Bimbingan Jabatan				
	d. Pemberdayaan Pengantar Kerja				
	1) Pengembangan Kompetensi Pengantar Kerja				
	2) Kerjasama antar Lembaga				
	3. Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
	a. Kelengkapan Penempatan				
	1) Perizinan Kelengkapan				
	2) Evaluasi Kinerja				
	b. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)				
	1) Penyajian dan Dokumen Penempatan TKI				
	2) Fasilitas Pelayaran TKI				
	c. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia				
	1) Advokasi dan Kepulungan				

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	2) Satuan dan Perintahungan d. Kerjasama Internasional 1) Kerjasama Bilateral 2) Kerjasama Regional dan Multilateral				
	4. Perluasan Kemampuan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal a. Tenaga Kerja Mandiri dan Sektor Informal 1) Tenaga Kerja Mandiri 2) Tenaga Kerja Sektor Informal b. Pengembangan Padat Karya 1) Padat Karya Perdesaan 2) Padat Karya Perkotaan c. Terapan Teknologi Tepat Guna 1) Pengembangan Teknologi Tepat Guna 2) Penyebarluasan Teknologi Tepat Guna d. Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga 1) Pemberdayaan Pendampingan 2) Kerjasama Antar Lembaga	Terbatas	Eseelon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
	5. Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing a. Analisis dan Pertinaan Sektor Industri 1) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri 2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Industri b. Analisis dan Pertinaan Sektor Jasa 1) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa 2) Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Sektor Jasa c. Pengendalian dan Kerjasama Kelembagaan 1) Pengendalian 2) Kerjasama Kelembagaan	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
	6. Standardisasi Profesi a. Sistem Informasi dan Registrasi 1) Dokumen yang berhubungan dengan sistem informasi dan registrasi 2) Dokumen yang berhubungan dengan Sertifikasi kompetensi kerja	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	b. Pembakuan Akreditasi 1) Dokumen yang berhubungan dengan kompetensi dan akreditasi kelembagaan sertifikasi 2) Dokumen yang berhubungan dengan penyelenggaraan konsensi dan persetujuan				
E. PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA					
1.	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi	Terbatas	Eseelon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
a.	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama				
1)	Peraturan Perusahaan				
2)	Perjanjian Kerja Bersama				
b.	Perjanjian Kerja				
c.	Kesejahteraan Pekerja				
1)	Program Kesejahteraan				
2)	Facilities Kesejahteraan				
d.	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja				
1)	Pemangguhungan Diskriminasi Syarat Kerja	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
2)	Evaluasi Diskriminasi Syarat Kerja				
2.	Kekembangan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial				
a.	Organisasi Pekerja dan Pengusaha				
1)	Organisasi Pekerja	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
2)	Organisasi Pengusaha				
b.	Kekembangan Hubungan Industrial				
1)	Lembaga Kerjasama EIPARKIT				
2)	Lembaga Kerjasama TRIPARKIT	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
c.	Pemasyarakatan Hubungan Industrial				
1)	Penyiapan Masyarakat Materi Perubahan Masyarakat Hubungan Industrial				
2)	Penyelenggaraan Penyuluhan Masyarakat Hubungan Industrial				
3.	Pengubahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
a.	Pengubahan				
1)	Usulan penyelesaian upah minimum Bupati/Walikota kepada Gubernur	Terbatas	Eseelon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAHAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	2) Usulan pengubahan pelaksanaan upah minimum dari Dunia Usaha kepada Gubernur 3) Penerapan Standar Pengupahan 4) Pengurusan Pengupahan	Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
	b. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja 1) Pengurusan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja 2) Kepesertaan Jamsostek Dalam Hubungan Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
	4. Pencegahan dan Penyelesaian Pelaksanaan Hubungan Industrial a. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 1) Pencegahan Diri 2) Penanganan Mogok dan Penutupan Perusahaan b. Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 1) Pengurusan Perselisihan Hubungan Industrial 2) Evaluasi dan Pelaporan c. Pemberdayaan Kerebangan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 1) Fungsionalisasi Perantara dan Legitimasi Mediator, Konsiliator, dan Arbiter Hubungan Industrial 2) Kerebangan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan di Luar Peradilan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
	F. PEMERINTAHAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN 1. Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja a. Pengawasan Norma Kerja 1) Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat 2) Pengawasan Norma Pengupahan b. Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat 1) Pengawasan Norma Hubungan Kerja 2) Pengawasan Norma Perlindungan Berserikat c. Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja 1) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dalam Negeri 2) Pengawasan Norma Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Luar Negeri	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
2.	3) Pengawasan Norma Kerja dan Jamseotek	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTRANS Kab. Balangan
	a. Pengawasan Norma Kerja Perempuan				
	1) Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi				
	2) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan				
	b. Pengawasan Norma Kerja Anak				
	1) Pengawasan Norma Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak				
	2) Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Anak				
	c. Kerjasama Lintas Sektoral				
	1) Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Perempuan				
	2) Kerjasama Lintas Sektoral Tenaga Kerja Anak				
	d. Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak				
	1) Advokasi Tenaga Kerja Perempuan				
	2) Advokasi Tenaga Kerja Anak				
	3. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja				
	a. Pengawasan Norma Teknik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan				
	1) Pengawasan Norma Teknik				
	2) Pengawasan Norma Pesawat Uap dan Bejana Tekan				
	b. Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Peningkatan Kebakaran				
	1) Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan				
	2) Pengawasan Norma Listrik dan Peningkatan Kebakaran				
	c. Pengawasan Norma Kesehatan Kerja				
	1) Pengawasan Norma Pelayanan Kesehatan Kerja				
	2) Pengawasan Norma Pemeliharaan Kesehatan Tenaga Kerja				
	d. Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya				
	1) Pengawasan Norma Lingkungan Kerja				
	2) Pengawasan Norma Bahan Berbahaya				
	e. Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Sistem Manajemen K3				
	1) Pengawasan Norma Ketenagakerjaan dan Kesehatan K3				

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
G.	2) Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3				
	4. Laporan Hasil Pengawasan Keternagakerjaan				
	5. Bina Peneragaan Hukum				
	a. Pemeriksaan Norma Keternagakerjaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
	1) Teknis Pemeriksaan Norma Keternagakerjaan				
	2) Penindakan Norma Keternagakerjaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
	b. Penyidikan Norma Keternagakerjaan				
	1) Teknis Penyidikan Norma Keternagakerjaan				
	2) Administrasi Penyidikan Norma Keternagakerjaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
	c. Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil				
G.	1) Pemberdayaan PPNS				
	2) Sarana dan Prasarana PPNS	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
	d. Kerjasama Peneragaan Hukum				
	1) Kerjasama Lembaga Peneragaan Hukum	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
	2) Kerjasama Pemeriksaan dan Penyidikan				
	e. Pelaksanaan pengawasan keternagakerjaan (Nota pemeriksaan dan BAP)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
	G. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA				
	1. Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan				
	a. Pengkajian K3	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
	1) Analisis dan Standardisasi bidang K3				
G.	2) Hasil kajian, perekrutan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K3				
	b. Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3				
	2. Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISNAKERTTRANS Kab. Balangan
	a. SDM K3				
	1) Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				
	2) Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				
	b. Kompetensi K3				
	1) Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				
	2) Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3				

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2 4) Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 5) Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3	3	4	5	6
H. KETRANSMIGRASIAN					
1. Perencanaan dan Pemberdayaan					
a. Pencadangan areal untuk pemukiman Transmigrasi					
b. Peta lokasi Transmigrasi					
c. Data lahan Transmigrasi					
d. Rencana strategis pembangunan Transmigrasi					
e. Penyusunan rencana satuan kawasan pengembangan					
2. Pengembangan kawasan, pengalihan dan penempatan penduduk					
a. Usulan penempatan Transmigrasi					
b. Peta lahan Transmigrasi					
c. Peta lahan eks lokasi Transmigrasi					
d. Pembangunan infrastruktur lokasi Transmigrasi					
DISNANKETRANS Kab. Balangan					
XIV					
URUSAN KESEHATAN					
1					
PERUMUSAN KEBIJAKAN					
Kebijakan di bidang Bina Upaya Kesehatan, Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan :					
A Pengkajian dan pengusulan kebijakan					
B Penyajian bahan					
C Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan					
D Pengumpulan dan pengolahan data					
E Penetapan dalam bentuk NSPK dan standartisasi					
2					
UPAYA KESEHATAN					
A Upaya Kesehatan Dasar					
(1) Pelayanan Kedokteran Keluarga					
(2) Praktik Klinis Bagi Dokter di Panyuskes Primer					
(3) Pelaksanaan Kesehatan Primer					
(4) Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas					
(5) Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit					
Biasa/Terbuka					
Eselon IV					
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan					
Dinas Kesehatan Kab. Balangan					
Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan					
Dinas Kesehatan Kab. Balangan					

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(6) ICD 10, Dentistry & Stomatology (7) Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (8) Penyakit Mulut di Tingkat Primer (9) Pembiayaan Darah (10) Penggunaan Darah Rasional (11) Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit dan Jejaring (12) Pelayanan Kesehatan di Daerah Terpencil, sangat terpencil dan (13) Akreditasi Puskesmas (14) Puskesmas Berprestasi B Upaya Kesehatan Rujukan (1) Pelayanan Kesehatan Rujukan (a) Rumah Sakit Bergarak (b) Rumah Sakit Pratama (c) Rumah Sakit Publik (d) Rumah Sakit Privat (e) Rumah Sakit Khusus (2) Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya (3) Pelayanan Rumah Sakit Privat (a) Akses Pelayanan SPKIDT Call 119 (b) Akses Pelayanan Rekamaya Jaringan dan Sel Puncu (c) Pelayanan Geriatri (d) Pelayanan Medical Tourism (e) Pelayanan Hyperbarik (4) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan (a) Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan (b) Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri (5) Badan Pengawas di Rumah Sakit (6) Petrisan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas A dan (Pernaman Modal Asing) PMA (a) Usulan Penetapan atau Peningkatan Kelas dari Pemilik RS atau Pimpinan Badan Hukum Rumah Sakit (b) Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi (c) Profil dan data Rumah Sakit 3 (tiga) Tahun Terakhir (d) Self Inspection Assessment sesuai dengan kelas yang diajukan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
3	Pemungutan Salah Lainnya Terhadap Orang Dengan Penyakit Gangguan Jiwa (b) Visum Et Repertum (3) Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko (a) Kesehatan Jiwa Di Sekolah (b) Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Pemungutungan (c) Pemungutungan Autisme (d) Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko (e) Psikologi Awal (PPA) Bagi Petugas Siaga Bencana PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN A Surveilans, Imunisasi, Kuratif, dan Kesehatan Matri (1) Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLBI) (a) Difteri (b) Polio (c) Penyelenggaraan Kegiatan Survei Pre TAS Filariasis (d) Surveilans Influenza (e) Keracunan Pangan (2) Imunisasi (a) Pekan Imunisasi Nasional (b) Coldchain Bagi Petugas Imunisasi (c) Introduksi Imunisasi DPT-HB-HIB (Pentavalen) pada bayi dan Balita (d) Imunisasi bagi Petugas Kesehatan (e) Imunisasi di Daerah Suli (f) Imunisasi TT bagi wanita usia subur (WUS) (g) Imunisasi bagi masyarakat umum (h) Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanangan vaksin baru DPT-HB-Hib (i) Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan Hib B/ Haemophilus influenza tipe B (4) Kesehatan Matri (a) Mudik Sehat (b) Kesehatan bagi Pemungut Darat, Pemungut Kapal Laut dan Pemungut Pesawat Udara (c) Kesehatan Migran (d) Upaya Kesehatan Penyelamatan dan Hyperbarik	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	ILAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
B	(c) Penanggulangan Kesehatan akibat gangguan Kamtibmas	Batas/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan
	(f) Kesehatan Transmigrasi bagi tenaga kesehatan				
	Pengendalian Penyakit Menular Langsung				
	(1) Pengendalian Tuberkulosis				
	(a) Pengendalian Penyakit TB				
	(b) TB Multi Drug Resistance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB.				
	(c) Laboratorium TB				
	(2) Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual				
	(a) Survei Terpadu Biologi dan Perilaku (STBP) / <i>Integrated Bio-Behavioural Surveillance</i> (IBBS)				
	(b) <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV)				
C	(c) Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), Konseling dan Test	Batas/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan
	(d) Obat <i>Anti Retro Viral</i> (ARV) dan reagen tes HIV				
	(3) Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut				
	(a) <i>Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus</i> (MERS CoV)				
	(b) Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)				
	(4) Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan				
	(a) Diare				
	(b) Tyfoid				
	(c) Hepatitis				
	(5) Pengendalian Kusta dan Frambusia				
C	(a) Kusta	Batas/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan
	(b) Frambusia				
	(c) Aliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANERK)				
	(1) Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang				
	(a) Kelambu berisektisida (LLINs)				
	(b) Eliminasi malaria				
	(c) Crosschecker mikroskopis malaria				
	(2) Pengendalian Arbovirolosis				
	(a) DBD				
	(b) Chikungunya				
C	(c) Ebola	Batas/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan
	(1) Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang				
	(a) Kelambu berisektisida (LLINs)				
	(b) Eliminasi malaria				
	(c) Crosschecker mikroskopis malaria				
	(2) Pengendalian Arbovirolosis				
	(a) DBD				
	(b) Chikungunya				
	(c) Ebola				
	(1) Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang				

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
(2)	(3) Pengendalian Zoonosis	Biasa/Tertutup	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan
	(a) Penyakit flu burung				
	(b) Vaksin Anti Rabies (VAR) baru				
	(c) Penyakit Pes				
	(d) Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1)				
	(4) Pengendalian Filariasis dan Kecacingan				
	(a) Filariasis				
	(b) Kecacingan				
	(c) Schistosomiasis				
	(5) Pengendalian Vektor				
	D Pengendalian Penyakit Tidak Menular				
	(1) Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah				
	(a) Penyakit Jantung				
	(b) Penyakit Pembuluh darah				
	(c) Penyakit Hipertensi				
	(d) Penyakit Stroke				
	(2) Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik				
	(a) Penyakit Diabetes Mellitus				
	(b) Penyakit gangguan Metabolik				
	(c) Penyakit gangguan Tiroid				
	(d) Gangguan Obesitas				
	(3) Pengendalian Penyakit Kanker				
	(4) Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif				
	(a) Penyakit Akibat produk tembakau				
	(b) Asma, Lupus, Thalassemia				
	(5) Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan				
	(a) Pengendalian Cidera				
	(b) Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas				
	(c) Peningkatan Kesehatan akibat Tindak Kekerasan				
	E Pencegahan Lingkungan				
	(1) Pencegahan Air dan Sanitasi Dasar				
	(a) Penguasaan Kualitas Air Minum				
	(b) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat				
	(2) Pencegahan Pemukiman dan Tempat-Tempat Umum				

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
4	(a) Hygiene sanitasi dan Bangunan Umum (b) Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan (c) Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum (3) Penyelesaian Keamanan dan Sanitasi Darurat (a) Penanggulangan kedururutan bidang Kesehatan Lingkungan (b) Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil perbatasan kepulauan (c) Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat (d) Penyelesaian kawasan dan sanitasi dasar (4) Hygiene Sanitasi Pangan (a) Makanan Jajanan (b) Restoran / Rumah Makan (c) Jasa Boga (d) Depot Air Minum (5) Pengamanan Limbah, Udara, dan Radiasi (a) Medis Pasyankes (b) Limbah Medis (Free Mercury) (c) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Andal) (d) Pengamanan Dampak kesehatan radiasi non pergon GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK A Gizi (1) Gizi Makro (a) Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 HPK, Stunting) (b) Pemantauan Pertumbuhan Anak (posyandu) (2) Gizi Mikro (a) Upaya penanggulangan masalah gizi mikro (GAKI (Gangguan Manajemen Taburita (b) Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya (3) Gizi Klinik dan Dietetik (a) Pelayanan Gizi di Puskesmas, Rumah Sakit, dan Instansi (b) Tataaksana Anak Gizi Buruk (c) Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Lebih (4) Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan (a) Makanan Pendamping ASI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Diran Kesehatan Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
C	(d) Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBX)	Biasa/Terbuka	Eseion IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan
	Kesehatan Anak				
	(1) Kelangsungan Hidup Bayi				
	(a) Pelayanan Kesehatan Neonatal				
	(b) Manajemen Asfeksia				
	(c) Manajemen BBR (Perat Bayi Lahir Rendah)				
	(d) Pencegahan Infeksi				
	(2) Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah				
	(a) Pelatihan SDDTK (Simulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang)				
	(b) Rujukan Tumbuh Kembang				
(3)	(c) Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (BCATT)	Biasa/Terbuka	Eseion IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan
	Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko				
	(a) Screening Hypotheroid Congenital				
	(b) Surveillance Kesehatan Anak				
	(c) Surveillance Kesehatan Bawaan				
	(4) Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja				
	(a) Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit				
	(b) Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja				
	(c) Usaha Kesehatan Sekolah				
	(5) Perlindungan Kesehatan Anak				
D	(a) Korban kekerasan terhadap anak	Biasa/Terbuka	Eseion IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan
	(b) Anak dengan disabilitas				
	(c) Anak terlanjur / anak jalanan di pantai				
	(d) Anak yang berhadapan dengan hukurn di Lapas/Rutan				
	(e) Anak kelompok terasing/kelompok minoritas				
	Kesehatan Tradisional Alternatif dan Komplementer				
	(1) Kesehatan Tradisional Keterampilan				
	(a) Akupresure				
	(b) Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional				
	(c) Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Puskesmas				
(2)	(d) Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya	Biasa/Terbuka	Eseion IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan
	Kesehatan Tradisional Rannuan				
(a)	Health Tourism	Biasa/Terbuka	Eseion IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu Kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(b) Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) (c) Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) (d) Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional (e) Pelayanan Kesehatan Tradisional Rannuan di Panyunkes (3) Kesehatan Alternatif dan Komplementer (a) Akupunktur (b) Obat Herbal / Obat Tradisional (c) Integrasi Yankesnat (d) Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya (4) Penapisan dan Kemitratan (a) Sentra Pererogan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T) (b) Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer (c) Penapisan Pengobat Tradisional Asing (d) Kemitratan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer (e) Pengobat Tradisional (Lokal) (f) Asosiasi Pengobat Tradisional E Kesehatan Kerja dan Olahraga (1) Pelayanan Kesehatan Kerja (a) Periyakit Akibat Kerja (b) Pemeriksaan Kesehatan Pekerja (c) Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) (2) Kapasitas Kerja (a) Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (b) Kapasitas Kesehatan Kerja (c) TP ASI (3) Lingkungan Kerja (a) Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP (b) K3 Perkantoran (c) K3 Rumah Sakit (d) K3 Puskesmas (e) Biomonitoring Efek Kesehatan (f) Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan (4) Kemitratan Kesehatan Kerja	Bisasi/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
5	(a) Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja (b) Kesehatan nelayan (c) Integrasi pos UKK (d) Kabupaten/kota percontohan (e) Penguatan profesi (5) Kesehatan Perkotan (a) Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan (b) Forum Kota (6) Kesehatan Olahraga (a) Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja (b) Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemah Haji (c) Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah (d) Olahraga bagi Ibu Hamil/Masa Nifas (e) Olahraga Bagi Usia Lanjut (f) Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN A Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Peredaran, Pengelolaan, Analisis, Pemantauan & Evaluasi) (2) Pengadaan Obat (a) Pengadaan Vaksin Reguler (b) Obat Esensial (c) Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kab. Kota dan Nasional (d) Obat Program Malaria (e) Obat Program Kesehatan Anak (f) Obat Program Kesehatan Ibu (g) Obat Program Gizi (h) Obat Anti Tuberkulosis (i) Obat Program Percepatan Pembangunan Kesehatan Tanah Papua (P2KTP) (j) Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia (k) Obat Penderita Thalassemia (l) Obat Psikiotropika Generik (m) Obat Anti Retro Viral (3) Perbekalan Kesehatan (a) Gudang Farmasi (b) Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(c) Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan (d) Pengadaan Reagen Screening Darah (e) Obat <i>Buffer Stock</i> (f) Hasil <i>Stock Opname</i> Obat	Biasa/Tertutup	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan
	B Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan (1) Alat Kesehatan (a) Alat kesehatan (b) Kopendium alat kesehatan (c) Pelabelan alat kesehatan dan PKRT (d) Post Market & Surveillance alat kesehatan (e) Produk alat kesehatan elektronik (f) Produk alat kesehatan non elektronik (2) Produksi dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat (a) Industri Farmasi (b) Pedagang Besar Farmasi (c) Pedagang Eceran Obat (d) Penyalur Alat Kesehatan (e) Toko Alat Kesehatan (f) Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan (3) Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (a) Produk Diagnostik In Vitro (b) Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) (c) PKRT Kelas III (d) PKRT Kelas I dan II (e) Perusahaan Rumah Tangga PKRT (f) Penggunaan Pesisida Di Rumah Tangga (g) Post Market & Surveillance PKRT C Kefarmasian (Standartisasi, klinis, komunitas dan Obat Tradisional) (a) Penggunaan Obat Rasional (b) Obat Rasional (c) Informasi Obat (d) Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik (e) Pemantauan Terapi Obat	Biasa/Tertutup	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
D	Produk dan Distribusi Kefarmasian (1) Obat Tradisional (a) Farmakope Indonesia (b) Farmakope Herbal Indonesia (c) Suplemen I Farmakope Indonesia (d) Suplemen II Farmakope Indonesia (e) Suplemen II Farmakope Indonesia (f) Suplemen I Farmakope Herbal Indonesia (g) Suplemen II Farmakope Herbal Indonesia (h) Suplemen III Farmakope Herbal Indonesia (i) Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) (j) Usaha Menengah Obat Tradisional (UMOT) (k) Usaha Jamu Gendong (UJG) (l) Usaha Jamu Racik (UJR) (m) Farmakope Herbal Indonesia & Suplemennya Versi Bahasa Inggris (2) Kosmetik dan Makanan (a) Keamanan Pangan (b) Kosmetika bagi Petugas (c) Industri Rumah Tangga bagi Petugas (d) Makanan Jajanan Anak Sekolah (e) Kodeks Kosmetika Indonesia (f) Materi Kosmetika Bahan Alam Indonesia	Biasa/Tertuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab.Balangan
7	PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN A Pencegahan, Mitigasi,Kesiapsiagaan (1) Pencegahan dan Mitigasi (2) Kesiapsiagaan B Tanggap Darurat dan Pemulihan (1) Tanggap Darurat (2) Pemulihan C Pemantauan dan Informasi (1) Pemantauan (2) Informasi D Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian Penyakit E Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana	Biasa/Tertuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab.Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PEKTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
8	PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN A Tersedianya data NHA Setiap Tahun B Tersedianya dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN KESEHATAN HAJI	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan
9	A Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji (1) Pemeriksaan Kesehatan Jannah Haji (2) Pelayanan Kesehatan jannah Haji kab/kota (3) Klinik Pelayanan Kesehatan di Embarkasi/Debarikasi atau KKP (4) Pelayanan Kesehatan Embarkasi (5) Rekrutmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) (6) Rekrutmen Tenaga Musiman B Peningkatan Kesehatan dan Penguatan Faktor Risiko Kesehatan Haji (1) Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji (2) Kesehatan Haji di Kab/kota (3) Kesehatan Haji Terpadu (4) Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jannah Haji (5) Vaksinasi jannah Haji (6) Sanitasi Asrama Haji (7) Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia dan Arab Saudi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan
10	PROMOSI KESEHATAN A Sarana Promosi Kesehatan (1) Booklet (2) Poster (3) Leaflet (4) Pamflet (5) Lembar Balik (6) Selebaran (7) Buletin (8) Festival (9) Lomba (10) Pameran (11) Seminar (12) Iklan Layanan Masyarakat (13) Film (14) Radio Spot	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
11	B Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran (1) Saka Bhakti Husada (2) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (3) Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan (4) Kawasasn Tanpa Rokok (5) Kerjasama dengan Swasta dibidang Kesehatan (6) Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan (7) Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan (8) Peran Serta Kader PKK dan Dasawisma dalam Mendukung	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab.Balangan
	C Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan (1) Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan (2) Kampanye Promosi Kesehatan (3) Video Animasi Promosi Kesehatan	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab.Balangan
	D Hari Kesehatan (1) Hari Kesehatan Nasional (2) Hari Kesehatan Dunia (3) Hari tanpa Tembakau se-Dunia (4) Hari-hari Besar Kesehatan	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab.Balangan
	DATA DAR INFORMASI A Statistik Kesehatan (1) Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan (2) Statistik Lingkungan dan Sumber Daya Kesehatan B. Analisis dan Discriminasi Informasi (1) Analisis Data Kesehatan (2) Discriminasi Informasi Kesehatan C Pengembangan Sistem Informasi dan Bank Data Kesehatan (1) Pengembangan Sistem Informasi (2) Bank Data D Identitas Penderita HIV/AIDS E Dokumen Rekam Medis Termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis F Laporan Kasus/Diagnosis Penyakit Pasien	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab.Balangan
		Biasa/Terbuka	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab.Balangan
		Biasa/Terbuka	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab.Balangan
		Biasa/Terbuka	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab.Balangan
		Biasa/Terbuka	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab.Balangan
		Biasa/Terbuka	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab.Balangan
		Biasa/Terbuka	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab.Balangan
		Biasa/Terbuka	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab.Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
G	Identitas Subjek Penelitian Dalam Rangka Pengembangan Kesehatan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan
	Rahasia Kedokteran, Yaitu Penemuan Dokter Dalam Rangka Pengobatan dan Dikawatir Dalam Rangka Medis	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak Yang Mengganggu Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan
	Hasil Audit Medik Pada Sarana Kesehatan	Tertutup	Eselon III	Memiliki dampak Yang Mengganggu Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan
	Hasil Audit Terkait Dengan Medical Error	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak Yang Mengganggu Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan
	Pelepasan Informasi Medis Untuk Kepentingan Klaim Asuransi	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak Yang Mengganggu Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Dinas Kesehatan Kab. Balangan
XV	URUSAN PEMERINTAH DAERAH				
1	KEHLIAKAN	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Tapem Setda Kab. Balangan
2	Pemerintahan umum dan Otonomi daerah KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Tapem Setda Kab. Balangan
3	F Fasilitas Penyelenggaraan Pemilu dan PILKADA	Biasa	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Tapem Setda Kab. Balangan
	1) Fasilitas pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden				
	2) Fasilitas pelaksanaan pemilu anggota legislatif				
	3) Fasilitas pemilihan kepala daerah				
	4) Pemak. Pemilu, Pilpres dan Pilkada				
PEMERINTAHAN UMUM	A Lambang	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Tapem Setda Kab. Balangan
	1) Sayembara				
	2) Penetapan penggunaan lambang				
	3) Ketentuan mengenai lambang pada logo, pataka bentuk dinas, lembaga dan organisasi lainnya				
	B Pemerintah Daerah				
	1) Pembentukan, pemekaran, pengangkatan, pemecahan dan penghapusan wilayah daerah	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kredibilitas dan reputasi	Tapem Setda Kab. Balangan
	2) Penyelenggaraan seragima batas wilayah	Rahasia	Eselon II		
	3) Administrasi dan dokumentasi perbatasan antar wilayah	Rahasia	Eselon II		

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	4) Pemindahan pusat Pemerintahan 5) Pemberian, penggantian/perubahan nama wilayah 6) Kerjasama antara daerah 7) Pencalonan, pengusulan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala daerah/Wakil kepala daerah 8) Pencalonan, pengusulan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	Tapem Setda Kab. Balangan Tapem Setda Kab. Balangan
	9) Laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah (LKP) & LPJTD)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Tapem Setda Kab. Balangan
	XVI				
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	A Data dan Informasi Pemberdayaan Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMD Kab. Balangan
	B Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMD Kab. Balangan
	C Naskah Ujian Tertulis Bagi Bakal Calon Kepala Desa, Perangkat Desa, Maupun Aparatur Pemerintah Lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMD Kab. Balangan
	D Pembinaan Lembaga Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMD Kab. Balangan
	E Pembinaan Sumber Daya Manusia 1) Latihan Pembangunan Desa Terpadu (LJTD) 2) Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMD Kab. Balangan
	F Pembinaan Partisipasi Masyarakat 1) Data Proyek Masyarakat 2) Peningkatan Asosiasi LPM	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMD Kab. Balangan
	G Pembinaan Sosial Budaya Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMD Kab. Balangan
	H Pemberdayaan Perempuan dan PSK	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMD Kab. Balangan
	I Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Penguatan Kesehatan, HIV, AIDS, LB, Bencana Alam, Narkoba, Masalah Sosial	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMD Kab. Balangan
	J Pembinaan Anak Remaja 1) Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan 2) Pembinaan Program Pasca Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMD Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR POKOK	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
K	Pembinaan Usaha Ekonomi Keluarga				
	1) Bantuan Pembangunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMD Kab. Balangan
	(a) Program pembangunan desa				
	(b) Program pengembangan kecamatan				
	(c) Program pengentasan kemiskinan (penyuluhan rasial)				
	(d) Dana tentang lokasi PKK dan bantuan pembangunan	Terbatas	Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMD Kab. Balangan
	2) Usaha Keluarga	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMD Kab. Balangan
	(a) Usaha kecil, jasa, kerajinan dan agrobisnis				
	(b) Usaha kecil menengah dan koperasi				
	(c) Bantuan stimulan (Swasta dan Pemerintah)				
XVII	(d) Optimalisasi hasil kerja/ mandiri				
	(e) Peningkatan hasil kerja/ mandiri				
	3) Data Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Keluarga, Hasil Usaha Masyarakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMD Kab. Balangan
	4) Bantuan Perbaikan				
	(a) Pembinaan usaha ekonomi desa simpun pinjam (UED-SIP)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPMD Kab. Balangan
	(b) Dana usaha simpun pinjam				
	URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	A Perencanaan Umum dan Program Kependudukan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDUCAPIL Kab. Balangan
	1) Pendaftaran Pendudukan meliputi :				
	(a) Formulir biodata penduduk				
	(b) Formulir permohonan, perpanjangan pembaharuan KK dan Mutasi penduduk pengurusan KTP dan Mutasi penduduk				
	(c) Formulir permohonan, perlindungan dokumen KTP, KK dari akta-akta adopsi, perubahan penggantian nama, pemalsuan dokumen, pendidikan, sensus kependudukan, warga negara asing				
	(d) Pengangkatan pejabat luar biasa catatan sipil dan pembantuannya				
	(e) Pendaftaran dan perpindahan penduduk WNA				
	(f) Pendaftaran dan perpindahan WNI				
	(g) Pendaftaran dan perpindahan penduduk pengungsi dan				

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HIK AKSES	DASAR PEKTIMBEANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
B. Pencatatan Sipil 1) Pencatatan Sipil Melalui (a) Formulir permohonan akta kelahiran perkawinan, perceraian, ganti perubahan nama kenal lahir/mati, adopsi, pendidikan sensus berpendudukan perubahan pengganti nama, pemalsuan dokumen (b) Akta kelahiran dan kematian (c) Akta Perkawinan dan Akta Perceraian (d) Kasus-kasus nikah cerai, rujuk yang meliputi penyelesaian dan laporannya (e) Kewarganegaraan WNA meliputi, permohonan, kelengkapan persyaratan dan peretapannya (f) Data dan informasi mengenai pencatatan, kewarganegaraan non perkawinan dan kelahiran (g) Catatan kelahiran dan kematian (h) Catatan perkawinan dan perceraian agama Islam (i) Catatan perkawinan dan perceraian non Islam (j) Catatan perkawinan dan perceraian advokasi perkawinan dan perceraian (k) Identifikasi dan investasi sistem, prosedur dan standar pelayanan pencatatan pengungkapan pengakuan, pengesahan anak, perubahan dan pembatalan (l) Catatan tentang pengungkapan, pengakuan, pengesahan anak, perubahan dan pembatalan akta (m) Data dan informasi tentang pencatatan kewarganegaraan akibat perkawinan, kelahiran dan non perkawinan	rentan, akibat bencana alam, kerusakan sosial, daerah terdampak (b) Proses pengungkapan pejabat luar biasa, pencatatan sipil dan pembantuannya	Biasa/Terbuka Rahasia Rahasia Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon II Eselon II Eselon III Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kredibilitas dan reputasi Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kredibilitas dan reputasi Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDURCAPIL Kab. Balangan DISDURCAPIL Kab. Balangan DISDURCAPIL Kab. Balangan DISDURCAPIL Kab. Balangan DISDURCAPIL Kab. Balangan DISDURCAPIL Kab. Balangan DISDURCAPIL Kab. Balangan DISDURCAPIL Kab. Balangan DISDURCAPIL Kab. Balangan DISDURCAPIL Kab. Balangan DISDURCAPIL Kab. Balangan DISDURCAPIL Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
7	(n) Ketajaksan dan pedoman teknis pencatatan kewarganegaraan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDURCAPL Kab. Balangan
	(o) Bahan bahan monitoring, pemantauan dan evaluasi pencatatan sipil	Biasa/Terbuka	Eselon IV		
	(p) Sistem dokumentasi pencatatan sipil	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDURCAPL Kab. Balangan
	C Informasi Kependudukan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDURCAPL Kab. Balangan
	1) Pengembangan perangkat lunak, keras dan jaringan komunikasi data				
	2) Fasilitas teknis pengembangan perangkat lunak, keras, jaringan komunikasi data				
	3) Manual teknis pengolahan data pendaftaran penduduk dan catatan sipil, daerah maju / berkembang				
	4) Kebijakan dan pedoman teknis pengolahan data pendaftaran penduduk, biodata, NIK, KTP dan KK				
	5) Manual teknis pengolahan data kejadian vital meliputi kelahiran, kematian, kedatangan dan perpindahan penduduk				
	6) Manual teknis pengolahan data penduduk dan non registrasi				
7	7) Manual teknis pengolahan sistem pelayanan media elektronik cetak dan outlet				
	8) Fasilitas pelayanan media elektronik, cetak dan outlet				
	9) Bahan-bahan monitoring, pemantauan dan evaluasi informasi kependudukan				
	10) Sistem dokumentasi informasi kependudukan				
	D Perkembangan Penduduk				
	1) Struktur dan komposisi penduduk	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DISDURCAPL Kab. Balangan
	2) Mortalitas dan morbiditas penduduk dan fasilitas	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDURCAPL Kab. Balangan
	3) Data kuantitas penduduk	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DISDURCAPL Kab. Balangan
	4) Data kualitas penduduk	Terbatas	Eselon III		
	5) Penataan persebaran penduduk antara wilayah sementara dan migran non permanen	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDURCAPL Kab. Balangan
7	6) Data dan informasi persebaran penduduk	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDURCAPL Kab. Balangan
	7) Penataan penduduk sementara dan non migran permanen	Biasa/Terbuka	Eselon IV		

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	ILAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
E	8) Telaahan dan kajian pengelolaan kelembagaan pemerintahan masyarakat, ekonomi dan sosial budaya	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDUCAPIL Kab. Balangan
	E Proyeksi dan Penyusunan Kebijakan Keperencanaan	Terbatas	Eseelon III	memilik dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DISDUCAPIL Kab. Balangan
	1) Telaahan dan pengkajian pengembangan, dokumentasi, pemanfaatan data kependudukan	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDUCAPIL Kab. Balangan
	2) Kebijakan dan pedoman teknis kependudukan	Biasa/Terbuka	Eseelon IV		
	3) Telaahan dan pengkajian implikasi, analisis, struktur dan komposisi, pemanfaatan proyeksi penduduk	Biasa/Terbuka	Eseelon IV		
	4) Data, informasi dan dokumentasi proyeksi penduduk	Biasa/Terbuka	Eseelon IV		
	5) Klasifikasi dan pedoman teknis proyeksi penduduk	Biasa/Terbuka	Eseelon IV		
	6) Telaahan dan pengkajian dampak kependudukan advokasi dan standarisasi	Biasa/Terbuka	Eseelon IV		
	7) Kebijakan dan pedoman teknis analisis dampak kependudukan	Biasa/Terbuka	Eseelon IV		
	8) Telaahan dan pengkajian penyesuaian lembaga usaha swasta, masyarakat dan mitra Internasional	Biasa/Terbuka	Eseelon IV		
F	9) Penyesuaian lembaga pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota	Biasa/Terbuka	Eseelon IV		
	10) Kebijakan dan pedoman teknis penyelesaian kelembagaan	Biasa/Terbuka	Eseelon IV		
F	Kewarganegaraan Asing	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDUCAPIL Kab. Balangan
	1) Laporan jumlah WNI keturunan asing	Biasa/Terbuka	Eseelon IV		
XVIII	KELUARGA BERENCANA	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	KB Kab. Balangan
A	Keluarga Berencana				
	1) Kebijakan yang ada hubungannya dengan program Keluarga Berencana				
	2) Pengadaan prasarana dan sarana untuk Keluarga Berencana gedung/bangunan, sarana mobilitas dan sarana lainnya				
	3) Penghargaan terhadap KB lestari				
	4) Pembinaan Keluarga Berencana				
	5) Laporan peserta KB				
6	(a) Penggunaan alat kontrasepsi KB, spiral IUD, pil, kondom, sterilisasi/vasektomi				
	6) Data/basis evaluasi mengenai pelaksanaan KB				

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2 7) Hasil pertemuan, seminar, survei ilmiah KB 8) Laporan kasus masalah KB 9) Laporan umum pelaksanaan program KB	3	4	5	6
XIX	URUSAN PENDIDIKAN				
1	KEBLAKAKAN BERSEKIPAT PENGATURAN A Kebijakan tentang pendidikan dan Pengajaran meliputi: kurikulum, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pendidikan dasar, menengah, atas dan pendidikan tinggi B MoU (Memorandum of Understanding) KEBLAKAKAN BERSEKIPAT PENETAPAN PEMBINAAN PENDIDIKAN A Pendidikan anak usia dini, non formal dan informal (1) Paud (a) Bahan ajar - Alat permainan edukatif (b) Pelatihan (c) Block Grant (d) Sosialisasi (e) Peringatan hari anak nasional (2) Pendidikan masyarakat (a) Penyelenggaraan program - Bahan ajar - Penyusunan majalah (b) Pemberian bantuan sosial - Penilaian proposal - Pemberian beasiswa (c) Pembinaan program - Temu koordinasi - Binalek program/pendampingan - Peningkatan kapasitas kelembagaan (d) Lomba, penghargaan, dan anugerah	Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eseelon IV Eseelon III Eseelon IV Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan DISDIK Kab. Balangan DISDIK Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(c) Pelatihan (d) <i>Block grant</i> (e) Bimbingan teknis/sosialisasi (f) Lomba, sayembara, dan festival (g) Bantuan operasional sekolah [BOS] (h) Bantuan siswa miskin (3) Pendidikan khusus-layanan khusus/TK-LK (a) Bantuan ajar (b) Pelatihan teknis (c) <i>Block grant</i> (d) Sosialisasi (e) Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore (f) Kurikulum/bahan pembelajaran (g) Alat bantu pembelajaran (h) Pendataan (i) Kelembagaan - Unit kesehatan sekolah - Pendidikan jasmani adaptif - Pendidikan inklusi - <i>Block grant</i> - Bimbingan teknis/sosialisasi - Lomba, sayembara, festival, gebyar, dan jambore (4) Pendidik dan tenaga pendidik (a) Pendidikan dan pemerataan (b) Pembinaan guru dan tenaga pendidik (c) Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi) (d) Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah (e) Penghargaan guru dan tenaga kependidikan (f) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan (g) <i>Block grant</i> (h) Bimbingan teknis/sosialisasi C Pendidikan menengah (1) Sekolah menengah atas dan SMK				
		Biasa/Terbuka	Esecion IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu	DISDIK

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	(a) Kurikulum (b) Bahan ajar (c) Pelajaran (d) <i>Block Grant</i> (e) Bimbingan teknis/sosialisasi (f) Lomba, sayembara, dan festival (g) Bantuan operasional sekolah [BOS] (h) Bantuan siswa miskin (2) Pendidikan khusus-layanan khusus/PK-LK (a) Bahan ajar (b) Petunjuk teknis (c) <i>Block grant</i> (d) Sosialisasi (e) Lomba, sayembara, festival, geyar, dan jambore (f) Kurikulum/bahan pembelajaran (g) Alat bantu pembelajaran (h) Pendataan (i) Kelembagaan - Unit kesehatan sekolah - Pendidikan jasmani adaptif - Pendidikan inklusi - <i>Block grant</i> - Bimbingan teknis/sosialisasi - Lomba, sayembara, festival, geyar, dan jambore (3) Pendidik dan tenaga pendidik (a) Pendidikan dan penelitian (b) Pembinaan guru dan tenaga pendidik (c) Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik (standar, uji, dan sertifikasi kompetensi) (d) Penilaian prestasi kerja (angka kredit) guru, dan pengawas sekolah (e) Penghargaan guru dan tenaga kependidikan (f) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidikan (g) <i>Block grant</i> (h) Bimbingan teknis/sosialisasi			kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
4	D Naskah Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Lernbaga	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	E Proses Scanning Lembar Hasil Ujian	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	F Proses Pengelolaan Data Peserta Didik, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) dan Sarana Prasarana	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	KEBUDAYAAN				
	A Pelestarian cagar budaya dan pemuseuman				
	(1) Registrasi nasional	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	(a) Pendaftaran dan penetapan				
	(b) Pengelolaan data	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	(2) Pelindungan				
	(a) Perlindungan dan pengamanan				
	(b) Pemeliharaan dan prnuguran	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	(3) Pengembangan dan pemanfaatan				
	(a) Pengembangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	(b) Pemanfaatan				
	(4) Eksplorasi dan dokumentasi				
	(a) Eksplorasi cagar budaya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	(b) Dokumentasi cagar budaya dan koleksi museum	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	(c) , kebudayaan dan pariwisata	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	B Pembinaan keserian dan perfrman				
	(1) Pembinaan seni pertunjukan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	(a) Seni pertunjukan tradisional				
	(b) Seni pertunjukan nontradisional				
	(2) Pembinaan seni rupa				
	(a) Seni rupa murni				
	(b) Seni rupa terapan				

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
C	(3) Pembinaan literasi dan apresiasi film (a) Literasi (b) Apresiasi	Biasa/Terbuka	Esection IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	(4) Dokumentasi dan publikasi (a) Dokumentasi seni dan film (b) Publikasi seni dan film				
	(1) Pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tradisi				
	(a) Kebudayaan dan kepercayaan				
	(b) Hubungan antar lembaga				
	(2) Komunitas kepercayaan (a) Komunitas adat (b) Upacara adat				
	(3) Pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional (a) Pengetahuan tradisional (b) Ekspresi budaya tradisional				
	(4) Lingkungan budaya dan pranata sosial (a) Lingkungan budaya (b) Pranata sosial				
	D Sejarah dan nilai budaya (1) Sejarah (a) Penggalian sumber sejarah (b) Penulisan sejarah				
	(2) Pemetaan nilai (a) Pemetaan (b) Klasifikasi				
E	(3) Verifikasi dan perumusan nilai (a) Verifikasi nilai (b) Perumusan nilai	Biasa/Terbuka	Esection IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	(4) Dokumentasi dan publikasi (a) Dokumentasi sejarah dan nilai budaya (b) Publikasi sejarah dan nilai budaya				
	(1) Internalisasi nilai dan diplomasi budaya (a) Internalisasi nilai budaya (b) Pengemasan nilai budaya				

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
5	(b) Penanaman nilai budaya	Biasa/Tertutup	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	(2) Kekayaan budaya				
	(a) Pencatatan kekayaan budaya				
	(b) Penetapan kekayaan budaya				
6	(3) Warisan budaya nasional dan dunia	Biasa/Tertutup	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	(a) Warisan budaya benda				
	(b) Warisan budaya takbernda				
	(4) Diplomasi budaya				
7	(a) Diplomasi dalam negeri	Biasa/Tertutup	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	(b) Diplomasi luar negeri				
	KURIKULUM				
	A Pembinaan kurikulum				
8	B Hasil evaluasi penyusunan kurikulum	Biasa/Tertutup	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	PERBUKUAN				
	A Penyusunan standar mutu buku				
	B Pengumpulan naskah				
9	C Penilaian mutu buku dan pemilihan	Biasa/Tertutup	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	D Persetujuan dan pengesahan naskah				
	E Penerbitan/pencetakan				
	F Master buku/naskah yang dicetak				
10	G Distribusi buku	Biasa/Tertutup	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	H Pengembangan naskah				
	I Pengkajian buku				
	PENILAIAN PENDIDIKAN				
11	A Penilaian akademik	Biasa/Tertutup	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	B Penilaian non akademik				
	C Analisis dan sistem informasi penilaian				
	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA				
12	A Pengembangan dan perlindungan	Biasa/Tertutup	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	(1) Pengkajian				
	(a) Bahasa				
	(b) Sastra				
13	(2) Pembakuan dan perlindungan	Biasa/Tertutup	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	(3) Informasi dan publikasi				

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
9	B Pembinaan dan penyayurakan (1) Penyayurakan (a) Penyuluhan (b) Bantuan teknis	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	C Pembelajaran (a) Proses pembelajaran (b) Pembinaan tenaga kebahasaan dan kekusasteraan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	D Peningkatan dan pengendalian (a) Peningkatan fungsi dan peran (b) Pengendalian penggunaan bahasa	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN				
	A Pengembangan profesi pendidik (1) Peningkatan kompetensi (a) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal (b) Pengembangan profesi pendidikkan dasar (c) Pengembangan profesi pendidik pendidikan menengah dan kejuruan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	(2) Sertifikasi (a) Pengembangan profesi pendidik paud, non formal, dan informal (b) Pengembangan profesi pendidkkan dasar (c) Pengembangan profesi pendidik pendidkan menengah dan kejuruan				
	B Pengembangan tenaga kependidikan (1) Program (a) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik (b) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai (2) Evaluasi (a) Pengembangan tenaga teknis dan fungsional non pendidik (b) Pengembangan tenaga pimpinan dan pegawai	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	C Pengembangan SDM kebudayaan (1) Program (a) Peningkatan kompetensi (b) Sertifikasi	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
10	(2) Evaluasi (a) Peningkatan kompetensi (b) Sertifikasi	Biasa/Tertuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	D Penjaminan mutu pendidikan (1) Pemetaan mutu (a) Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal (b) Penjaminan mutu pendidikan dasar (c) Penjaminan mutu pendidikan menengah dan kejuruan (2) Sistem Informasi (a) Penjaminan mutu paud, nonformal, dan informal (b) Penjaminan mutu pendidikan dasar (c) Penjaminan mutu pendidikan menengah dan kejuruan				
	E Penyusunan materi/SOP/instrumen/panduan/pedoman (1) Proposal/TOR/KAK				
	F Penyelenggaraan pelatihan/dicertifikasi/soialisasi				
	G Penyelenggaraan bimtek/ monitoring dan evaluasi				
	H Lomba/ sayembara/festival/olimpiade pendidikan nasional internasional				
	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN				
	A Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis radio, televisi, dan film (1) Perancangan dan produksi (2) Penyiaran dan pengendalian				
	B Pengembangan teknologi pembelajaran berbasis multimedia dan web (1) Perancangan dan produksi (2) Aplikasi dan pengendalian				
	C Pengembangan jejaring (1) Pengkajian dan perancangan (2) Pemeliharaan dan pengendalian				
11	DATA DAN STATISTIK PENDIDIKAN	Biasa/Tertuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISDIK Kab. Balangan
	A Data peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan (1) Validasi dan integrasi data peserta didik (2) Validasi dan integrasi data peserta pendidik dan tenaga kependidikan				

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNTUK PENGOLOMPOK
1	2	3	4	5	6
7	Pembinaan dan Tenaga Olahraga A POPDA B Pembinaan dan pembinaan olahraga Berbakat C Kompetisi sepak bola pelajar, tenis lapangan, tenis meja, angkat besi, dayung, judo, taekwondo, bola voli, atletik dan panahan/Nasional/POPWIL/POPONASI D Pembinaan dan pembinaan olahraga berbakat (POPDA) Standarisasi Sarana dan Prasarana Olahraga : A Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Balangan	DISFORA Kab. Balangan
8		Biasa/Terbuka	Eselon IV	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemutakhiran dan reputasi	DISFORA Kab. Balangan
XXI	URUSAN AGAMA				
1	Kebijakan Keagamaan Meliputi Kebijakan di Bidang Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Budha, Kerukunan Umat Beragama dan Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Balangan	Bagian Bina Kessos Setda Kab. Balangan
2	Bimbingan Masyarakat Islam A Wakaf 1) Permohonan lain tukar menukar Tanah Wakaf (Ruhsah) 2) Permohonan penunjukan Lembaga Keuangan Syariah Pemeritaa 3) Bantuan Pengembangan Wakaf Produktif 4) Bantuan Sertifikasi Tanah Wakaf 5) Pendaftaran Wakaf 6) Akta Ikrar Wakaf 7) Formulir Wakaf	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon III Eselon III Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintahan Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintahan Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Balangan	Bagian Bina Kessos Setda Kab. Balangan Bagian Bina Kessos Setda Kab. Balangan Bagian Bina Kessos Setda Kab. Balangan Bagian Bina Kessos Setda Kab. Balangan Bagian Bina Kessos Setda Kab. Balangan Bagian Bina Kessos Setda Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
XXII 1	8) Surat Pengesahan Nadzir Wakaf	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Bagian Bina Kessos Setda Kab. Balangan
	B Zakat	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Bagian Bina Kessos Setda Kab. Balangan
	1) Bimbingan dan pembinaan Lembaga Zakat				
	2) Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat				
	C Rumah ibadah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Bagian Bina Kessos Setda Kab. Balangan
	1) Bantuan pengelola rumah ibadah				
	2) Bantuan rumah ibadah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	Bagian Bina Kessos Setda Kab. Balangan
	D Kerukunan umat beragama	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Bagian Bina Kessos Setda Kab. Balangan
	1) Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)				
	E Event Keagamaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Bagian Bina Kessos Setda Kab. Balangan
XXII 1	1) Musabegah Tilawatil Quran (MTQ)				
	2) Seleksi Tilawatil Quran (STQ)				
	F Penyelenggaraan Haji dan Umroh	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	Bagian Bina Kessos Setda Kab. Balangan
	1) Penetapan Tim Pemantau Haji Daerah (TPHD)				
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Standar kebijakan umum bidang PU : pengaliran, jalan, jembatan, bangunan				
	A Pengaliran :	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPU/PR Kab. Balangan
	1) Pembangunan bar				
	2) Rehabilitasi				
	3) Pemeliharaan				
	Jalan :	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPU/PR Kab. Balangan
	1) Pembangunan baru				
	2) Rehabilitasi				
	3) Pemeliharaan				
	4) Peningkatan				

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
C	Jembatan 1) Pembangunan baru 2) Rehabilitasi 3) Pemeliharaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
D	Bangunan : 1) Pendirian 2) Pemeliharaan 3) Pembebasan dan perertihan bangunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
E	Tata Kota 1) RTR (Rencana Induk Kota) 2) Rencana detail tata ruang kota 3) Rencana rinci kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
F	Peta tanah bangunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
G	Gambar Konstruksi (blue print)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
H	Data industri konstruksi bangunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
I	Studi kelayakan : Studi pendahuluan, studi pra kelayakan dan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
J	Standarisasi, kriteria teknis, spesifikasi, manual teknis dan prosedur	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
K	Pelaksanaan bidang PU 1) Pemberian izin bidang PU meliputi : Izin mendirikan bangunan 2) Permohonan perizinan yang ditolak 3) Keringan pemberian izin meliputi : Permohonan pembebasan atas pemberian keringanan 4) Pembatalan izin meliputi : Pengaduan, hasil pemeriksaan / peninjauan, pembebasan, 5) Dokumen pelaksanaan pengadaan lahan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
L	Kontraktor dan pemborong (tender, penunjuk, kualifikasi) 1) Daftar rekening meliputi : Daftar rekening golongan ekonomi lemah, 2) Permohonan kualifikasi dan klasifikasi perusahaan meliputi :	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	LUK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
M	a) Permohonan, persyaratan, hasil penelitian b) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan gambar-gambar teknis 3) Kasus-kasus dalam pelaksanaan kualifikasi perusahaan 4) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan gambar-gambar teknis sebelum	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan DPUPR Kab. Balangan DPUPR Kab. Balangan DPUPR Kab. Balangan
	Perencanaan barang / jasa melalui belang	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
	1) Umum 2) Terbatas 3) Pembiayaan Langsung 4) Pembiayaan langsung	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
	Pengadaan barang / jasa melalui swakelola turah dan batu, aspal, besi dan logam lainnya, bahan-bahan pelindung dan pengawet, semen, kayu, bahan penutup atap, alat-alat pengangkutan dan pengunci, dan bahan-bahan bangunan lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
O	Konsultasi bangunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
P	Penerbitan bangunan meliputi : Penerbitan tanpa izin / tidak memenuhi syarat / ketentuan yang berlaku, bangunan yang sudah membahayakan / lapuk, peringatan / teguran, penyelesaian, pengesangan dan pelaksanaan lainnya, kasus-kasus bangunan pengurusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
Q	Penerbitan bangunan meliputi : penerbitan tanpa izin / tidak memenuhi syarat / ketentuan yang berlaku, bangunan yang sudah membahayakan / lapuk, peringatan / teguran, penyelesaian, pengesangan dan pelaksanaan lainnya, kasus-kasus bangunan pengurusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengaturan lalu lintas air	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
R	Inventaris bangunan kepuyasan dan atau yang disusut oleh pemerintahan termasuk bukti kepemilikan dan cara perolehannya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
S	Peta bangunan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
	1) Pembiayaan, peta, blue print, pemeliharaan, perbaikan, peningkatan, bangunan pengurusan meliputi : waduk, bendungan, bangunan pembiayaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
2)	Pembuatan, pemeliharaan dan rehabilitasi saluran pembuangan air kotor dan limbah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTI MBANGAN	UNIT PENGOJAH
1	2	3	4	5	6
	3) Inventarisasi bangunan-bangunan pergiliran inventarisasi sungai dan dan mata air termasuk buku-buku kepemilikan 4) Pemeliharaan dan pengelolaan pergiliran oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A) meliputi : pengumpulan data pemeliharaan, petunjuk laporan mengenai kerusakan bangunan pergiliran				
T	Pengelolaan air minum 1) Penyediaan fasilitas air bersih 2) Distribusi pemakaian air bersih 3) Pengawasan penggunaan air bersih 4) Data dan statistik air bersih	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak ☐ yang mengganggu kinerja Pemerintah ☐ Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
U	Pengelolaan Jalan 1) Pemeliharaan dan perbaikan jalan 2) Penyediaan lokasi/area jalan 3) Pelebaran dan pemeliharaan jalan 4) Inventarisasi jalan 5) Data lalu lintas dan penggunaan jalan 6) Laporan pemeliharaan jalan 7) Laporan kerusakan jalan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak ☐ yang mengganggu kinerja Pemerintah ☐ Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
V	Lingkungan hidup 1) Pembiayaan dan penyuluhan lingkungan hidup 2) Pengawasan dan pengendalian tata lingkungan hidup 3) Pengawasan lingkungan hidup, cagar budaya, taman nasional, flora, dan fauna 4) Pencemaran dan penguatan/pengawasan lingkungan 5) Penghargaan bidang lingkungan hidup 6) Pembinaan izin berburu satwa, izin galian golongan C dan lain usaha tambang 7) Pembiayaan dan penyuluhan lingkungan hidup	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak ☐ yang mengganggu kinerja Pemerintah ☐ Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
W	Pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian tata lingkungan hidup meliputi : 1) Wilayah lingkungan hidup lingkungan industri, rekreasi, pertanian, kawasan, lingkungan termasuk pemberian kansu 2) Pelestarian lingkungan meliputi antara lain : Penetapan sebagai cagar budaya, taman nasional, flora fauna	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak ☐ yang mengganggu kinerja Pemerintah ☐ Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
Q	Pencemaran lingkungan dan penguatan/pengawasannya meliputi : 1) Pencemaran udara, limbah industri dan kesehatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak ☐ yang mengganggu kinerja Pemerintah ☐ Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
V	2) Pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam pemeliharaan				
	3) Pelestarian lingkungan hidup				
	Pemberian izin meliputi :				
	1) Izin bertuara satwa yang dilindungi, izin bahan galian golongan C	Biasa/Terbuka	Esekon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
	2) Data statistik lingkungan hidup daerah	Biasa/Terbuka	Esekon IV		
5)	3) Hasil hasil seminar, simposium, lokakarya dan sejenisnya mengenai	Biasa/Terbuka	Esekon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
	4) Pengawasan dibidang lingkungan hidup			Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
	5) Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup Daerah (NKLD)	Biasa/Terbuka	Esekon IV		
				Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPUPR Kab. Balangan
XXIII	2) Amdal meliputi :				
	1) Kebijakan Teknis Amdal	Biasa/Terbuka	Esekon IV		
	2) Pengkajian dan Penilaian Dokumen Amdal				
	3) Evaluasi dan RKL dan RPL				
	4) Penghargaan Adipura				
	DPK KABUPATEN BALANGAN				
	Kesugrahan	Terbatas	Esekon III	memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPKD Kab. Balangan
	Pencalonan	Terbatas	Esekon III	memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPKD Kab. Balangan
	Pengungkapan	Terbatas	Esekon III	memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPKD Kab. Balangan
	- SK Gup	Terbatas	Esekon III	memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPKD Kab. Balangan
	Pembekutan	Terbatas	Esekon III	memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPKD Kab. Balangan
	- SK Gup	Terbatas	Esekon III	memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPKD Kab. Balangan
	Recall	Terbatas	Esekon III	memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPKD Kab. Balangan
	Pelanggaran	Terbatas	Esekon III	memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPKD Kab. Balangan
	Pergantian Antar Waktu	Terbatas	Esekon III	memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPKD Kab. Balangan
	- SK Gup	Terbatas	Esekon III	memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPKD Kab. Balangan
	Persidangan	Terbatas	Esekon III	memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPKD Kab. Balangan
	-Reses	Terbatas	Esekon III	memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPKD Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOJAH
1	2	3	4	5	6
XKIV	Kesejahteraan	Terbatas	Eselon III	memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPRD Kab. Balangan
	Keuangan	Terbatas	Eselon III	memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPRD Kab. Balangan
	Penghargaan	Terbatas	Eselon III	memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPRD Kab. Balangan
	Hak	Terbatas	Eselon III	memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPRD Kab. Balangan
	Sekretaris DPRD Kabupaten/ Kota	Terbatas	Eselon III	memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPRD Kab. Balangan
	Kelengkapan DPRD	Terbatas	Eselon III	memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPRD Kab. Balangan
	1 . PNS DPRD	Terbatas	Eselon III	memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPRD Kab. Balangan
	2 . SK DPRD	Terbatas	Eselon III	memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPRD Kab. Balangan
	3 . MuO	Terbatas	Eselon III	memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DPRD Kab. Balangan
	URUSAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN				
KEAMANAN/ KETERTIBAN	-Polisi Pamong Praja	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
	- Penegakan Peraturan Daerah	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
	-Penyakit Masyarakat (Pekas)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
	Penerbitan PKL	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
	-Pengawalan	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
	PSK	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOJAH
1	2	3	4	5	6
Gepeng		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang menggunakan pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
PPNS		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang menggunakan pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
-Tindakan Pidana Rungan (Tipterung)		Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
PERTAHANAN					
Darat		Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
Udara		Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
Pertahanan		Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
KEMILITERAN					
Latihan Militer		Terbatas	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
Wajib Militer		Terbuka	Eselon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
Operasi Militer		Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
Kekayaan ABRI/TNI		Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
Pejabat Sipil dari ABRI/TNI Klasifikasi Dwifungsi ABRI/TNI		Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
KEAMANAN					
Kepolisian		Terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
Ituara bara/ demonstrasi		Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
Senjata api/ senjata tajam		Terbatas	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
Bahan peledak		Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
Perjudian		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang menggunakan pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
1	2	3	4	5	6
Surat surat Kaleng		Rahasia	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
Pengaduan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat daerah unit kerja Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
Pemalsuan		Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
Korupsi/Pecelewengan/Peryalahgunaan Jabatan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu daerah unit kerja Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
Perkosaan/Perbuatan Cabul		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
Kecelakaan		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
Kecelakaan Lainnya		Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas perangkat daerah unit kerja Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
BENCANA					
Gantung betup/germpa		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat daerah unit kerja Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
Himbauan/larangan		Terbuka	Eselon III	Tidak Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat daerah unit kerja Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
PERTAHANAN SIPIL					
Perlindungan Masyarakat (Linmas)		Biasa/Terbuka	Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
KEJAHATAN					
Makau/Pembunuhan		Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
Pembunuhan		Rahasia	Eselon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
1	2	3	4	5	6
XXV	Pengangkutan, pencurian dan pemerasan	Rahasia	Eseelon III	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
	Subversi/ Penyelundupan/ Narkoba	Rahasia	Eseelon II	Mengakibatkan terganggunya keamanan di lingkungan Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
	Banjir/ tanah longsor	Biasa/ Terbuka	Eseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
	Angin Topan	Biasa/ Terbuka	Eseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
	Kebakaran	Biasa/ Terbuka	Eseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
	a. Pembinaan,				
	b. Pengujiangan,				
	c. Pencegahan,				
	d. Pemadaman				
	e. Pengujian Instalasi				
	f. Antisipasi				
	g. Proteksi, APAR				
	h. Kebutuhan sarpras				
1	Kekeringan	Biasa/ Terbuka	Eseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
	Tsunami	Biasa/ Terbuka	Eseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
	KECELAKAAN SAR	Biasa/ Terbuka	Eseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
	Daerah	Biasa/ Terbuka	Eseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
	Udara	Biasa/ Terbuka	Eseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
2	Sungai/daerah	Biasa/ Terbuka	Eseelon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	SATPOL PP Kab. Balangan
	XXV	URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
1	KEBIJAKAN	Biasa/ Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Kesbangpol Kab. Balangan
	Ketijaksanaan dan standarisasi teknis di bidang politik dan dalam negeri, kesatuan bangsa dan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, bina pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, kependudukan dan pencatatan sipil serta keuangan daerah				
2	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	A. Pembinaan ideologi dan Pengendalian	Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Kesbangpol Kab. Balangan
1)	Pembinaan ideologi Pancasila, kesatuan bangsa, organisasi sosial				

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNTUNG PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	politik dan kemasyarakatan				
	2) Laporan keadaan politik				
	3) Pembertarikan keadaan bahaya dan jam malam				
	(a) Pembertarikan				
	(b) Ketentuan pelaksanaan				
	(c) Pengawasan				
	4) Monitoring dan evaluasi mengenai keadaan IPOL/KSOSBUD				
B	Pembinaan Partai Politik	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Kesbangpol Kab. Balangan
	1) Data dan kepengurusan parpol				
	2) Agenda kerja aktivitas parpol				
	3) Monitoring kegiatan parpol				
C	Pengawasan Organisasi Terlarang	Rahasia		Menimbulkan kerugian yang serius terhadap Privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak keutuhan dan reputasi	Kesbangpol Kab. Balangan
	1) Pendirian, pembubaran dan pengawasan partai/ organisasi terlarang				
	2) Daftar dan data pengurus anggota partai/ organisasi terlarang				
	3) Pemuthahan bagi anggota partai/ organisasi terlarang				
	4) Izin meninggalkan tempat atau pindah domisili bagi anggota partai/ organisasi terlarang				
	5) Daftar organisasi terlarang				
	6) Laporan mengenai organisasi terlarang				
D	Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Kesbangpol Kab. Balangan
	Organisasi kemasyarakatan terdiri dari organisasi berdasarkan keamanan kegiatan dan agama/kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa				
E	Pembinaan Wawasan Kebangsaan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Kesbangpol Kab. Balangan
F	Facilitasi Penyelenggaraan Pemilu dan PILKADA	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Kesbangpol Kab. Balangan
	1) Facilitasi pelaksanaan pemilu anggota legislatif				
	2) Facilitasi pelaksanaan pemilu anggota legislatif				
	3) Facilitasi pemilihan kepala daerah				
	4) Daftar organisasi peserta pemilu (OPP)				
	5) Facilitasi pendaftran pemilu sampai dengan penetapan daftar pemilu				
	6) Facilitasi pengamanan dan pengaturan masa kampanye				
	7) Facilitasi dan mediasi sengketa pemilu/PILKADA				
G	Pengawasan Konflik Terorisme	Rahasia		Menimbulkan kerugian yang serius	Kesbangpol

A. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO.	JENIS / SERIES ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6
	8) Pencabutan, pengusulan, pengesahan, pengungkutan dan pemberhentian Anggota DPRD 9) Pencabutan, pengusulan, pengesahan, pengungkutan dan pemberhentian Sekretaris Daerah 10) Data anggota DPRD 11) Data rancangan-rancangan keputusan DPRD 12) Catatan-catatan, Notulen, Risalah rapat yang dinyatakan tertutup 13) Laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah 14) Pembinaan lembaga pertanggung jawab	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon IV Eselon IV	tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	 Kesbangpol Kab. Balangan Kesbangpol Kab. Balangan



B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PENERINTAH KABUPATEN BALANGAN

[illegible]

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PEKTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
6		6) Surat Keterangan Meninggal Dunia	Terbatas	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan
		d. Usul kenaikan pangkat/golongan/jabatan	Terbatas	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan
		e. Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan Struktural/Pungsional	Biasa/Terbuka	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan
		f. Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan
		g. Peningkatan Masa Kerja	Terbatas	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan
		h. Berkas Bapercakal	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan
		ADMINISTRASI PEGAWAI	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan
		a. Surat Perintah Dinas/Surat Tugas	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan
		b. Cuti Besar	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan
		c. Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan
		d. Cuti Alasan Penting	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan
		e. Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN)	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan
		f. Dokumentasi Identitas Pegawai	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan
		1) Usul Penetapan Karpeg/KPeg/Karis/Karsu	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan
		2) Keanggotaan Organisasi Profesi/Kedinasan	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan
		3) Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan
		4) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan
		g. Berkas Kepegawaian dan Daftar Urut Kenaikan (DURK)	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan
		h. Berkas Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR POKOK	UNIT PENGOLOH
1	2	3	4	5	6	7
7		KESELAJUTAN PEGAWAI a. Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai b. Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/BPJS c. Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan d. Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial e. Berkas tentang Layanan Pakai Dinas f. Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal karena dinas g. Berkas tentang Pemberian Taji Kasih h. Berkas tentang Pemberian Pagar Penghargaan dan Tanda Jasa i. Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi	Biasa/Tertutup Biasa/Tertutup Biasa/Tertutup Biasa/Tertutup Biasa/Tertutup Biasa/Tertutup Biasa/Tertutup Biasa/Tertutup Biasa/Tertutup	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan BKPPD Kab. Balangan BKPPD Kab. Balangan BKPPD Kab. Balangan BKPPD Kab. Balangan BKPPD Kab. Balangan BKPPD Kab. Balangan BKPPD Kab. Balangan BKPPD Kab. Balangan
8		PEMBERHENTIAN PEGAWAI TANPA HAK PENSUN	Tertutup	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan
9		PERSELISIHAN/SENGKETA KEPEGAWAIAN	Tertutup	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan tugas dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan
10		USUL PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN PENSUN PEGAWAI/JANDA/DUDA DAN ASN YANG MENINGGAL	Biasa/Tertutup	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKPPD Kab. Balangan
11		BERKAS PERSEORANGAN APARATUR SIPIL NEGARA a. Berkas Lamaran yang diterima b. Nota Penetapan NIP dan Kelengkapannya c. Nota Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN d. SK Pengangkatan CASN e. Hasil Pengujian Kesehatan f. SK Pengangkatan ASN g. SK Penunjukan Masa Kerja h. SK Kenaikan Pangkat	Rahasia	Eselon III	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap pelayan, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi	BKPPD Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		l. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Menduduki Jabatan dan Surat Pernyataan Pelantikan j. SK Pengangkatan dalam jabatan atau Pemberhentian dari jabatan struktural/Fungsional k. SK Perpindahan Wilayah Kerja l. SK Perpindahan Antar Instansi m. SK Cuti di luar Tanggungan Negara (CLTN) n. Berita Acara Pemeriksaan o. SK Hukuman Jabatan/Hukuman Disiplin ASN p. SK Perbantuan/Dipekerjakan di luar Instansi Intuk q. SK Penarikan Kembali dari Perbantuan/Dipekerjakan r. SK Pemberian Uang Tunjangan s. SK Pembahasan dari Jabatan Organik karena diangkat sebagai Pejabat Negara t. SK Pengalihan ASN u. SK Pemberhentian sebagai ASN v. SK Pemberhentian Sementara w. Surat Keterangan Penyataan Hilang x. Surat Keterangan Kembalinya ASN yang dinyatakan hilang y. SK Penggantian Nama z. Surat perbaikan Tanggal Tahun Kelahiran aa. Akta Nikah/Cerai bb. Akta Kelahiran cc. Isian Formulir PU/ASN dd. Berita Acara Pengambilan Sumpah/Jang ASN dan Jabatan ee. Surat Permonnan Menjadi Anggota Purpol ff. Surat Keterangan Mutasi Keluarga gg. Surat Keterangan Meninggal Dunia/hilang hh. Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan ii. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional jj. Surat Keterangan Hasil Penelitian Khusus kk. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala ll. Surat Tugas/ Izin Belajar Dalam/ Luar Negeri mm. Surat Izin Bepergian ke Luar Negeri nn. Kartu Daftar Ulang (Kardaf) ASN				

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		00. Ijazah/Sertifikat pp. SK Penempatan/Penarikan Pegawai qq. SK Peningkatan pada Jabatan di luar Instansi Induk rr. Surat Pertumbuhan Status ASN ss. SK Pengaktifan Kembali Sebagai ASN tt. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatan Organik karena uu. SK Pensiun				
12		BERKAS PERSEORANGAN PELABAT NEGARA	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak komitmen dan reputasi	BKPPD Kab. Balangan
13		BERKAS PERSEORANGAN KEPALA SKPD	Rahasia	Eselon II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap privacy, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak komitmen dan reputasi	BKPPD Kab. Balangan
II		FUNGSI KEUANGAN A. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN (APBD-P) 1. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) a. Kebijakan Umum, Strategi, dan Prioritas - Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)/Musrenbang Tingkat Provinsi - Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) b. Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah c. KUA beserta Nota Kesepakatannya d. Dokumen Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) e. Nota Kesepakatan PPA f. Prioritas Plafon Anggaran 2. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) a. Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah b. Dokumen RKA-SKPD	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		3. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) a. Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD: - Nota Keuangan Pemerintah - Materi RAPBD b. Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah c. Dokumen Persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah tentang RaPerda APBD d. Dokumen Rancangan Penjabaran APBD beserta lampirannya e. Penyampaian Permohonan Evaluasi kepada Gubernur tentang RAPBD beserta penjabarannya f. Hasil Evaluasi Gubernur tentang RAPBD g. Penetapan Perda APBD oleh Gubernur beserta penjabarannya h. Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-1) a. Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan 1 Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2 Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja) 3 Dokumen evaluasi pelaksanaan RKPD 4 Dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan yang telah dibahas bersama antara DPRD dan 5 Prioritas Plafon Anggaran Perubahan b. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Perubahan Dokumen Pedoman Penyusunan RKA-SKPD Perubahan yang telah disetujui Sekretaris Daerah c. Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 1 Pengantar Nota Keuangan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Daerah RAPBD Perubahan: - Nota Keuangan Pemerintah - Materi RAPBD 2 Hasil Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah	Biasa/Terbuka	Easelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan
			Biasa/Terbuka	Easelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		2. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi 3. Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 5. Data penerimaan APBD yang dikelola Bendaharawan Umum Daerah	Biasa/Terbuka Tertutup Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eseelon IV Eseelon IV Eseelon IV Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan
		C PELAKSANAAN ANGGARAN 1. Surat Penyedia Dana (SPD, SPN, dan SP2D) : UP, GU, TU, LS 2. Pendapatan a. Pendapatan Asli Daerah 1 Surat Ketetapan Pajak Daerah 2 Surat Setoran Pajak (SSP) Daerah antara lain : -Pajak Hotel -Pajak Restoran -Pajak Hiburan -Pajak Reklame -Pajak Penerangan Jalan -Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan -Pajak Parkir -Pajak Air Tanah -Pajak Sertifikat Burang Walat -PBB Sektor Perdesaan dan perkotaan -Beban Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) 3 Surat Ketetapan Retribusi Daerah 4 Bukti Pemakaian Retribusi, antara lain : a) Retribusi Jasa Umum -Retribusi Pelayanan Kesehatan -Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil -Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO KLASIFIKASI	KODE 2	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		-Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum -Retribusi Pelayanan Pasar -Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor -Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran -Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta -Retribusi Pengujian Kapal Perikanan - bj Retribusi Jasa Usaha -Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -Retribusi Pasar Grosir dan/atau Per tokoan -Retribusi Tempat Pelelangan -Retribusi Terminal -Retribusi Tempat Khusus Parkir -Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa -Retribusi Penyedotan Kakus -Retribusi Rumah Potong Hewan -Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga -Retribusi Penyeberangan di atas Air -Retribusi Pengolahan Limbah Cair -Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - cj Retribusi Perizinan Tertentu -Retribusi Izin Mendirikan Bangunan -Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol -Retribusi Izin Gangguan -Retribusi Izin Trysek - di Retribusi Pengrusdahan Lalu Lintas - ej Retribusi Penyelenggaraan Izin Mempelajari Tugu 5 Bukti Penerimaan Jasa Layanan Kesehatan Masyarakat 6 Dokumen Keabsahantitas Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah 7 Bukti Penerimaan SKPD dari Badan Layanan Umum 8 Bukti Penerimaan Hasil Pengolahan Dana Bergulir 9 Bukti Penerimaan Bunga dan atau Jasa Giro pada Bank b. Dokumen Penerimaan Dana Perimbangan 1 Dana Bagi Hasil Yang Bersumber Dari Pajak dan Bukan Pajak 2 Dana Bagi Hasil Untuk Kabupaten 3 Dana Alokasi Umum (DAU)	Biasa/Tertuka	Eseion IV	Tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BRKD Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan Termasuk Arsip Data Komputer (ADK) - Laporan Pendapatan Negara - Laporan Kesehatan Kredit Anggaran (LKK) Bulanan/Triwulan/Semesteran - Bukti Kas Pengeluaran berikut lampirannya	Rahasia	Esection II	Menimbulkan kerugian yang serius terhadap <i>privacy</i> , keuntungan kompetitif, balangnya kepercayaan, serta merusak komitmen dan reputasi	BKD Kab. Balangan
		7 Daftar Gaji	Terbatas	Esection III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan
		8 Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)	Terbatas	Esection IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan
		9 Pertanggungjawaban APBD - Materi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah - Nota Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Pemerintah - Pemandangan umum Fraksi terhadap Raperda - Pertanggungjawaban APBD oleh DPRD - Jawaban Bupati atas pemandangan umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD - Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD - Permohonan Evaluasi Gubernur tentang Raperda dan Raperbup Pertanggungjawaban APBD - Evaluasi Gubernur tentang Raperda Pertanggungjawaban dan Raperbup APBD - Perda dan Pergub Pertanggungjawaban APBD	Terbatas	Esection IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan
		10 Laporan Keuangan Tahunan terdiri dari : - Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Neraca - Laporan Perubahan Saldo Lebih - Laporan Operasional - Laporan Arus Kas - Laporan perubahan Ekuitas - Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)	Terbatas	Esection IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGO LAH
1	2	3	4	5	6	7
		11 Data Belajar Bendaharawan Umum Daerah baik berupa belanja pegawai dan belanja lainnya 12 Sgl Penguji SP2D yang disampaikan ke Bank Kabel untuk pencairan dana 13 Dokumen rekonsiliasi dan verifikasi laporan keuangan atas investasi daerah, investasi perikanan dan Non perikanan 14 Dokumen keuangan penyusunan pertanggungjawaban dana transfer Pemerintah Pusat 15 Laporan Keuangan Pemerintah yang belum diaudit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon IV Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan
		D PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI 1. Dokumen Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (<i>Bine Book</i>) 2. Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membayar (<i>Green Book</i>) 3. Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU), dan dokumen sejenisnya 4. Dokumen <i>Loan Agreement</i> (PHLN) seperti : <i>Draft Agreement, Legal Opinion</i> , Surat menyurat dengan <i>Lender</i> 5. Dokumen Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, a.l : <i>Usulan</i> Luncuran Dana 6. Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya : - <i>Reimbursement</i> - <i>Direct Payment/ Transfer Procedure</i> - <i>Special Commitment/ L/C Opening</i> - <i>Special Account/Imprest Fund</i> 7. Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (<i>Payment Advice</i>)	Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan
			Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO KLASIFIKASI	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		8. Dokumen Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya 9. <i>Replenishment</i> (Perminaan Perarikan Dana dari Negara Donor) meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE) 10 <i>Staff Appraisal Report</i> 11. <i>Report/Laporan</i> yang terdiri dari: - <i>Progress Report</i> - <i>Monthly Report</i> - <i>Quarterly Report</i> 12. Laporan Hutang Daerah : - Laporan Pembiayaan Hutang Daerah - Laporan Posisi Hutang Daerah 13. <i>Completion Report/Annual Report</i> 14. Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Terbatas Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eseelon III Eseelon III Eseelon IV Eseelon IV Eseelon IV Eseelon IV Eseelon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan
		E. PENGELOLAAN APBD/DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) 1. Keputusan Kepala Daerah tentang Pencetakan: - Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran - Pejabat Pembuat Komitmen - Kuasa Pengguna Barang/Jasa - Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah - Pejabat Pemanduan/Pengawasan SPM - Bendahara Perencanaan/Pengeluaran	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eseelon IV Eseelon IV Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan
		F. SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD) 1. Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 2. Dokumen Kebijakan Akuntansi	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eseelon IV Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOLOH
1	2	3	4	5	6	7
		3. Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi 4. Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/ Semesteran 5. Laporan Pajak Pribadi (LJ2P)	Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon III Eselon III Eselon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan
		G PENYALURAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN 1. Surat Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara atas Pengguna Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan 2. Berkas Permintaan Pembayaran (SPM) dan lampirannya : - SPP-LS, SPP-GU, SP3, Daftar Perincian Penggunaan Dana, SPPR-LS, SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, Bilyet Giro, SPM Nihil - Pengisian/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta bukti Pendukungnya id : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank - Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 3. Buku Rekening Bank 4. Keputusan Pembukuan Rekening 5. Pembukuan anggaran terdiri dari : Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan Daftar Pembukuan Pencarian/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencarian (DHP) dan Rekening Koran	Terbatas Terbatas Terbatas	Eselon IV Eselon III Eselon IV	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan
		H PENERIMAAN ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN 1. Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya 2. Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh, Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan, dll	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAHAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		1 PENGELOLAAN ANGGARAN PILKADA DAN BIAYA BANTUAN PEMILU DARI APBD 1. Dokumen Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan PEMILU dari APBD a. Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu b. Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu c. Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD, PPK, PPS, KPPS dan Parwasa, Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Parwas d. Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu e. Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota f. Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Parwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD g. Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada h. Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD i. Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD	Biasa/Tertuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan
		J PELAKSANAAN ANGGARAN PILKADA DAN ANGGARAN BIAYA BANTUAN PEMILU 1. Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu 2. Berkas Penerimaan Komisi, Rahat, Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu 3. Berkas Setor Sisa Dana Pilkada/Pemilu termasuk Setor Komisi Pengadaan Barang/Jasa, Rahat, Bunga, Jasa Qiro 4. Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank 5. Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya	Biasa/Tertuka Tertukas Tertukas Tertukas Biasa/Tertuka	Eselon IV Eselon III Eselon III Eselon III Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan BKD Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
	K.	PELAKSANAAN ANGGARAN OPERASIONAL PEMILU	Bersa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan
	1.	Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu dan PPKO Provinsi termasuk Perubahan/ Pengeseran/ Revisinya	Terbatas	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah	BKD Kab. Balangan
	2.	Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank	Terbatas	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan
	3.	Berkas Penyaluran Biaya Pemilu ke PPK, PPS dan KPPS termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank dan lain-lain	Terbatas	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan
	1.	PEMERIKSAAN/PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH	Terbatas	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan
	1.	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan	Terbatas	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan
	2.	Pelaksanaan Pengawasan	Terbatas	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan
	a.	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)	Terbatas	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan
	b.	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAi) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut	Terbatas	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan
	c.	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang tidak memerlukan tindak lanjut (TL)	Terbatas	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan
	d.	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan	Terbatas	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan
	e.	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D)	Terbatas	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan
	f.	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Pemerintah Daerah	Terbatas	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan
	g.	Good Corporate Governance (GCG)	Bersa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan
	3.	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah:	Terbatas	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan
	a.	Tuntutan Perbendaharaan	Terbatas	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan
	b.	Tuntutan Ganti rugi	Terbatas	Eseelon III	Memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	BKD Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

[illegible]

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		8 Dokumentasi Hukum Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan yang dijabarkan referensi 9 Sosialisasi / Penyuluhan / Pembinaan Hukum 10 Bantuan / Konsultasi Hukum / Advokasi Berkas tentang pemberian bantuan/konsultasi hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama) 11 Kasus / Sengketa Hukum a. Pidana Berkas tentang kasus/sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran : - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembinaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum b. Perdata Berkas tentang kasus/sengketa perdata : c. Tata Usaha Negara - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembinaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum d. Perburuhan Berkas tentang kasus/sengketa Perburuhan : - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembinaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum e. Arbitrase Berkas tentang kasus/sengketa Perburuhan : - Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis - Berkas pembinaan dan bantuan hukum - Telaah hukum dan opini hukum	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Tertutup	Eselon IV / Staf Eselon IV Eselon IV Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	Bag. Hukum Setda Kab. Balangan Bag. Hukum Setda Kab. Balangan Bag. Hukum Setda Kab. Balangan Bag. Hukum Setda Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		f. Sengketa sengketa g. Kasus-kasus yang berkaitan dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) h. Anak kurang peleccehan seksual/bekkerasan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban 12 Perizinan 13 Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) a. Hak Cipta b. Hak Paten Paten Biasa Paten Sederhana c. Hak desain Industri d. Hak Rahasia Dagang e. Hak Merek f. DTLIS (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) 14 Pemohonan Hak yang dilolok (Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merek, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu)	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Bag. Hukum Setda Kab. Balangan Bag. Hukum Setda Kab. Balangan
V		ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN 1 Pembentukan atau Perubahan Organisasi Perangkat Daerah 2 Penyusunan Uraian Tugas Perangkat Daerah 3 Pemantauan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 4 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan dan Perangkat Daerah 5 Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat bagi Perangkat Daerah	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang akan menimbulkan dampak yang akan mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang akan menimbulkan dampak yang akan mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang akan menimbulkan dampak yang akan mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang akan menimbulkan dampak yang akan mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Bagian Organisasi Setda Balangan Bagian Organisasi Setda Balangan Bagian Organisasi Setda Balangan Bagian Organisasi Setda Balangan Bagian Organisasi Setda Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
VI		6 Fasilitas Pembuatan Kartu Tanda Pengenal PNS	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang akan menimbulkan akibat buruk atau merugikan bagi organisasi atau pejabat yang bersangkutan jika isinya diketahui atau dibaca orang lain	Bagian Organisasi Setda Balangan
		7 Peningkatan Layanan Publik	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang akan menimbulkan akibat buruk atau merugikan bagi organisasi atau pejabat yang bersangkutan jika isinya diketahui atau dibaca orang lain	Bagian Organisasi Setda Balangan
		8 Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang akan menimbulkan akibat buruk atau merugikan bagi organisasi atau pejabat yang bersangkutan jika isinya diketahui atau dibaca orang lain	Bagian Organisasi Setda Balangan
		9 Ketentuan Ketatalaksanaan dan Prosedur Kerja	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang akan menimbulkan akibat buruk atau merugikan bagi organisasi atau pejabat yang bersangkutan jika isinya diketahui atau dibaca orang lain	Bagian Organisasi Setda Balangan
		10 Penyusunan Anjamb, ABK dan Evaluasi Jabatan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang akan menimbulkan akibat buruk atau merugikan bagi organisasi atau pejabat yang bersangkutan jika isinya diketahui atau dibaca orang lain	Bagian Organisasi Setda Balangan
		11 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang akan menimbulkan akibat buruk atau merugikan bagi organisasi atau pejabat yang bersangkutan jika isinya diketahui atau dibaca orang lain	Bagian Organisasi Setda Balangan
		KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN				
		1. Telekomunikasi : Administrasi penggunaan / langganan peralatan telekomunikasi meliputi : telepon,radio,teleks,TV kabel dan internet	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Bag. Umum Setda Kab. Balangan
		2. Perumahan Dinas a. Dalam Daerah b. Luar Daerah	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Bag. Umum Setda Kab. Balangan
		3. Administrasi penggunaan fasilitas kantor meliputi permintaan dan penggunaan ruang, gedung, kendaraan, wisma, rumah dinas dan fasilitas kantor lainnya	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Bag. Umum Setda Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

[illegible]

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOLOH
1	2	3	4	5	6	7
VIII		6. Bahan/materi pidato/sidang MPR, DPR, DPRD, kabinet, DPRD, Musipda Provinsi/kabupaten/kota	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	Bag. Humas dan Protokol Setda Kab. Balangan
		7. Naskah pidato sambutan yang belum dibacakan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Bag. Humas dan Protokol Setda Kab. Balangan
		8. Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal	Biasa/Terbuka	Staf	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Bag. Humas dan Protokol Setda Kab. Balangan
		9. Publikasi melalui media cetak maupun elektronik	Biasa/Terbuka	Staf / Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Bag. Humas dan Protokol Setda Kab. Balangan
		10. Pamfletan/seyemburan/kompa/festival, pembuatan spanduk dan iklan	Biasa/Terbuka	Staf / Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Bag. Humas dan Protokol Setda Kab. Balangan
		11. Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Bag. Humas dan Protokol Setda Kab. Balangan
		12. Administrasi pemberian penghargaan/tanda kenang-kenangan kepada masyarakat yang memiliki jasa prestasi besar	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	Bag. Humas dan Protokol Setda Kab. Balangan
		KEARSIPAN				
		1. Kebijakan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DINSIP Kab. Balangan
		2. Pembinaan kearsipan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DINSIP Kab. Balangan
		A) Bina Arsiparis	Biasa/Terbuka	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	DINSIP Kab. Balangan
		1) Bimbingan konsultasi arsiparis	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DINSIP Kab. Balangan
		2) Penilaian Arsiparis	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DINSIP Kab. Balangan
		3) Pemeliharaan arsiparis teladan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DINSIP Kab. Balangan
		a) Penyelenggaraan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DINSIP Kab. Balangan
		b) Bertas penempatan arsiparis teladan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DINSIP Kab. Balangan
		4) Database arsiparis	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DINSIP Kab. Balangan
		B) Bimbingan dan Konsultasi (Sosialisasi, Seminar, Lokakarya, Workshop)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DINSIP Kab. Balangan
		1) Penerapan sistem dalam penyelenggaraan kearsipan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DINSIP Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

[illegible]

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO KLASIFIKASI	KODE 2	JENIS ARSIP 3	KLASIFIKASI KEAMANAN 4	HAK AKSES 5	DASAR PERTIMBANGAN 6	UNIT PENGOLAH 7
1		- Penyusunan daftar arsip inaktif c) Penyimpanan Arsip - Skema penyimpanan arsip aktif dan inaktif - Peta lokasi penyimpanan arsip - pengamanan d) Alih Media - Kebijakan alih alih media - Autentikasi - Berita secara - Daftar arsip yang alihmediakan e) Program arsip vital	Terbatas Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon IV Eselon III Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	DINSIP Kab. Balangan DINSIP Kab. Balangan DINSIP Kab. Balangan
		4) Autentikasi Arsip Dinamis a) Pembuktian autentikasi b) Pendapat tenaga ahli c) Pengujian d) Penerapan autentikasi arsip statis/surat pernyataan penciptaan arsip 5) Penyusutan a) Pemindahan Arsip inaktif - berita secara pemindahan - daftar arsip yang dipindahkan b) Pemusnahan Arsip yang tidak bernilai guna - penilaian panitia penilai - permintaan persetujuan (Kepala ANRI, Kepala lembaga kearsipan) - penetapan arsip yang dimusnahkan - berita secara pemusnahan c) Penyerahan arsip Statis - pemberitahuan panitia penilai - notulen rapat penilai - surat pertimbangan panitia penilai - surat persetujuan dari kepala LKD	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	DINSIP Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh dan dapat dipergunakan - keputusan/penetapan penyerahan - berita acara penyerahan arsip - daftar arsip yang diserahkan 6) Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis a) Database pengolahan arsip aktif b) Database pengolahan arsip tidak aktif c) Database arsip Statis B) Pengelolaan Arsip Statis 1) Akuisisi a) Monitoring fisik dan dan daftar b) Verifikasi terhadap daftar arsip c) Menetapkan status arsip statis d) persetujuan untuk penyerahan e) penetapan arsip yang diserahkan f) berita acara penyerahan arsip g) daftar arsip yang diserahkan 2) Sejarah Lisan a) administrasi pelaksanaan sejarah lisan b) Hasil wawancara sejarah lisan - berita acara wawancara sejarah lisan - laporan kegiatan - hasil wawancara (kaset / CD) dan transkrip 3) Daftar Pencarian Arsip Statis a) penggunaan b) akuisisi daftar pencarian arsip statis 4) Penghargaan dan Imbalan 5) Pengolahan a) Menata informasi b) Menata fisik c) menyusun sarana bantu temu balik - Guide - Daftar arsip statis - Inventaris arsip statis	Tertutup Batas/Tertutup	Eselon III Eselon IV	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DINSIP Kab. Balangan DINSIP Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		6) Presefasi a) Preventif - Penyimpanan - pengendalian hama terpadu - Reproduksi (ahli media) * Berita secara alih media * Daftar arsip yang diabmedikan - perencanaan penanganan bencana b) Kuratif - Perawatan arsip 7) a) Pembuktian autentitas b) Pendapat tenaga ahli c) Pengujian d) Pencapaian autentitas arsip statis/ surat pernyataan 8) Akses Arsip Statis a) Layanan arsip b) Penderbitan naskah sumber - Administrasi proses penyusunan - Hasil naskah sumber arsip c) Pameran arsip 9) Jasa Kearsipan a) Konsultasi kearsipan b) Manual kearsipan c) Penata arsip d) Otomasi kearsipan e) Penyimpanan arsip f) Perawatan dan pemeliharaan arsip g) Database jasa kearsipan				
IX		PENELITIAN, PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN 1. Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, pelayanaan, penerapan serta pelayanaan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi : kelayanaan, sumberdaya dan jaringan 2. Penelitian dan pengkajian a. Rencana Kerja - Master plan / rencana strategis	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eseelon IV Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BALITBANGCIDA Kab. Balangan BALITBANGCIDA Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		- Rencana kerja tahunan : proposal / <i>idea concept paper</i> (CP) - Berkas / kontrak MoU kerjasama / material transfer agreement (MTA) - Perjanjian penelitian - b Administrasi penelitian : surat tugas / surat perintah, pembentukan tim kerja, dokumen / formulir - c Pelaksanaan penelitian / pengkajian - Prosedur / petunjuk - Data primer - Log Book - Studi kelayakan - Instrumen penelitian - Pelaksanaan survey - Laporan hasil penelitian / survey - Analisis / pengolahan data - d Hasil penelitian / pengkajian / rekomendasi - Laporan hasil penelitian dan hasil tahunan - Rekomendasi - e Hasil penelitian dan pengkajian hasil jasa layanan				
		3 Pengembangan dan Inovasi - Rencana Kerja - Administrasi pengembangan dan inovasi - Pelaksanaan - Hasil pengembangan / inovasi	Biasa/Tertbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	EA/LT/BA/CIDA Kab. Balangan
		4 Dokumen	Biasa/Tertbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	EA/LT/BA/CIDA Kab. Balangan
		penelitian / pengkajian / penyusunan / replika / prototype hasil penelitian / pengkajian / penyusunan / pengembangan / inovasi : 5 Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi	Biasa/Tertbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	EA/LT/BA/CIDA Kab. Balangan
		6 Diseminasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi - a Promosi - b Pemasaran	Biasa/Tertbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	EA/LT/BA/CIDA Kab. Balangan
		7 Pembinaan penelitian / pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Biasa/Tertbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	EA/LT/BA/CIDA Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAKEZ AKSES	DASAR PERTIEMANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		8 Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 9 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 10 Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi a. Penelitian: jurnal / buletin ilmiah, bahan publikasi khusus b. Leaflet dan booklet c. Kamus istilah 11 Hak atas kekayaan intelektual (HAKI) 12 Forum Komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 13 Layanan jasa penelitian, pengembangan, penerapan IPTEK a. Jasa laboratorium pengujian b. Jasa teknologi produksi c. Jasa studi d. Jasa penyewaan peralatan e. Jasa pertantuan tenaga ahli / profesi f. Jasa sertifikasi / kalibrasi dan sertifikasi g. Buku rekaman barang yang diuji / dikalibrasi 14 Sertifikasi personal peneliti 15 Akreditasi laboratorium	Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Terbatas Biasa/Terbuka	Eseelon IV Eseelon IV Eseelon IV Eseelon IV Eseelon III Eseelon IV Eseelon IV Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	BALITBANGDA Kab. Balangan BALITBANGDA Kab. Balangan BALITBANGDA Kab. Balangan BALITBANGDA Kab. Balangan BALITBANGDA Kab. Balangan BALITBANGDA Kab. Balangan BALITBANGDA Kab. Balangan BALITBANGDA Kab. Balangan
X		TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISKOMINFO Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		4) Kualitas pelayanan dan harmonisasi standar 5) Standar dan audit perangkat lunak 2. Sumber Daya Dan Perangkat A) Pemasaran Sumber Daya 1) Alokasi spektrum dinas a) Alokasi dinas tetap b) Alokasi dinas bergerak darat 2) Alokasi spektrum Non dinas tetap dan bergerak darat a) Alokasi dinas penyiaran b) Alokasi dinas penerbangan, maritim dan satelit 3 Orbit satelit a) Notifikasi dan penataan Filint Satelit b) Tata kelola hubungan antar penyelenggara 4) Ekonomi sumber daya a) Analisa industri dan ekonomi b) Penanganan izin prior 5) Harmonisasi teknik spektrum a) Teknik spektrum antar lembaga b) Harmonisasi dan notifikasi terrestrial B) Operasi Sumber Daya 1) Pelayanan spektrum dinas a) Pelayanan dinas tetap b) Pelayanan dinas bergerak darat 2) Pelayanan spektrum Non Dinas a) Pelayanan dinas penyiaran b) Pelayanan dinas penerbangan, maritim dan satelit 3) Sertifikasi operator radio a) Pelayanan amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk b) Pelayanan operator radio 4) Pemasangan biaya a) Pemasangan piutang biaya hak penggunaan frekuensi radio b) Analisa dan evaluasi biaya hak penggunaan frekuensi radio 5) Konsultasi dan data operasi sumber daya a) Konsultasi dan informasi sumber daya b) Pengelolaan data operasi sumber daya	Biasa/Tertuka	Esection IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISKOMINFO Kab. Balangan
			Biasa/Tertuka	Esection IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISKOMINFO Kab. Balangan

B. KLASIPIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		C) Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika 1) Pengelolaan sistem monitoring spektrum a) Rancang bangun teknologi monitoring spektrum b) Pemeliharaan sistem informasi monitoring spektrum 2) Pengelolaan sistem informasi manajemen spektrum a) Rancang bangun sistem informasi manajemen spektrum b) Pemeliharaan sistem informasi manajemen spektrum 3) Monitoring dan Penertiban Spektrum a) Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Bergerak Tetap dan Bergerak Terestrial b) Monitoring dan Penertiban Spektrum Dinas Non Bergerak Tetap dan Bergerak Terestrial 4) Monitoring dan Penertiban a) Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika b) Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika 3. Penyelenggaraan Pos Dan Informatika A) Pos 1) Layanan dan Penerapan Pos Universal a) Layanan b) Penerapan Layanan 2) Layanan Pos Komersial a) Tata Kelola Layanan b) Data dan Informasi Layanan 3) Prangko dan Filateli a) Prangko b) Filateli 4) Iklim Usaha Pos a) Pos Universal b) Pos Komersial 5) Penerbitan Pos a) Layanan Pos Universal a) Pos Komersial B) Telekomunikasi 1) Layanan Jaringan Telekomunikasi a) Akses	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISKOMINFO Kab. Balangan
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISKOMINFO Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		1) Backbone 2) Layanan Jasa Telekomunikasi a) Jasa Teleponi Daser, Nilai Tambah Teleponi, Sistem dan Transaksi Elektronik b) Jasa Multimedia 3) Penomoran telekomunikasi dan informatika a) Penomoran Telekomunikasi b) Penomoran Informatika 4) Tarif dan interkoneksi a) Tarif telekomunikasi b) Interkoneksi telekomunikasi 5) Kelayakan sistem telekomunikasi a) Pelayanan sistem jaringan dan jasa b) Penerapan teknologi telekomunikasi C) Penyiaran 1) Pemetaan dan database a) Pemetaan penyelenggaraan radio dan televisi b) Database penyelenggaraan radio dan televisi 2) Verifikasi dan uji coba siaran a) Verifikasi dan uji coba siaran radio b) Verifikasi penyelenggaraan radio dan Televisi 3) Radio a) Lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran radio b) Lembaga penyiaran swasta radio 4) Televisi a) Lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran b) Lembaga penyiaran swasta televisi 5) Iklim usaha penyiaran a) Penyusunan dan evaluasi regulasi penyiaran b) Penerapan kewajiban lembaga penyiaran D) Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal 1 Telekomunikasi khusus, penyiaran publik dan kewajiban universal a) Analisa penyelenggaraan	Biasa/Terbuka	Eaelon IV	Tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISKOMINFO Kab. Balangan
			Biasa/Terbuka	Eaelon IV	Tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISKOMINFO Kab. Balangan



B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOLOH
1	2	3	4	5	6	7
		b) Pelayanan 2) Telekomunikasi khusus Non Pemerintah a) Analisa penyelenggaraan b) Pelayanan 3) Layanan khusus penyiaran a) Publik radio b) Publik televisi 4) Pelayanan kewajiban universal a) Perencanaan pembangunan b) Monitoring dan evaluasi 5) Pengembangan infrastruktur a) Perencanaan infra struktur b) Analisa ekonomis infrastruktur E) Pengendalian Pos dan Informasi 1) Monitoring dan evaluasi Pos a) Monitoring b) Evaluasi 2) Monitoring dan evaluasi jaringan dan telekomunikasi a) Monitoring b) Evaluasi 3) Monitoring dan evaluasi jasa telekomunikasi a) Monitoring b) Evaluasi 4) Monitoring dan evaluasi penyiaran a) Monitoring b) Evaluasi 5) Pencegahan dan pemberitaan a) Pencegahan b) Pemberitaan 4. Aplikasi Informatika A) e-Government 1) Tata kelola e-Government a) Program e-Government b) Evaluasi e-Government 2) Teknologi dan infrastruktur e-Government				
			Biasa/Tertuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISKOMINFO Kab. Balangan
			Biasa/Tertuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISKOMINFO Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAHAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		4) Pemberdayaan informasi masyarakat khusus a) Pengembangan model b) Penerapan model D) Pemberdayaan Industri Informatika 1) Industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika a) Pemberdayaan b) Promosi 2) Industri perangkat informatika pengguna a) Pemberdayaan b) Pengembangan produk 3) Industri perangkat lunak a) Pemberdayaan b) Pengembangan produk 4) Industri konten multimedia a) Pemberdayaan b) Pengembangan produk E) Keamanan Informasi 1) Tatakelela keamanan informasi a) Kelembagaan b) Manajemen risiko 2) Teknologi keamanan informasi a) Infra Struktur b) Aplikasi 3) Monitoring evaluasi dan tanggap darurat keamanan informasi a) Infra Struktur b) Aplikasi 4) Penyelidikan dan penanganan a) Monitoring dan evaluasi keamanan informasi b) Tanggap darurat peristiwa keamanan informasi 5) Budaya keamanan informasi a) Penyidikan b) Penindakan 5. Informasi Dan Komunikasi Publik A) Komunikasi Publik 1) Komunikasi publik	Biasa/Terbuka	Esection IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISKOMINFO Kab. Balangan
			Tertbatas	Esection III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	DISKOMINFO Kab. Balangan
		5. Informasi Dan Komunikasi Publik A) Komunikasi Publik 1) Komunikasi publik	Biasa/Terbuka	Esection IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISKOMINFO Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		a) Program komunikasi publik b) Monitoring dan evaluasi 2) Pengelolaan opini publik a) Pengumpulan opini publik b) Pengolahan opini publik 3) Layanan komunikasi publik a) Pengumpulan data b) Pengolahan data B) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Informasi 1) Informasi layanan hukum dan keamanan a) Politik dan keamanan b) Hukum dan hak asasi manusia 2) Informasi perekonomian a) Keuangan, perbankan dan jasa b) Industri dan perdagangan 3) Informasi kesejahteraan rakyat a) Agama, sosial dan budaya b) Pendidikan kesehatan dan lingkungan hidup C) Pengelolaan Media Publik 1) Media cetak 2) Media online 3) Media luar ruang dan audio visual D) Kemitraan Komunikasi 1) Kemitraan komunikasi a) Program kemitraan pemerintahan dan lembaga negara b) Monitoring dan evaluasi 2) Kemitraan media dan dunia usaha a) Program kemitraan media dan dunia usaha b) Monitoring dan evaluasi 3) Kemitraan organisasi kemasyarakatan dan profesi a) Program kemitraan organisasi kemasyarakatan dan profesi b) Monitoring dan evaluasi E) Layanan Informasi Internasional 1) Layanan informasi media asing a) Program layanan informasi media asing				
			Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Balangan	DISKOMINFO Kab. Balangan
			Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Balangan	DISKOMINFO Kab. Balangan
			Biasa/Terbuka	Eseelon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintahan Kab. Balangan	DISKOMINFO Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

[illegible]

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN ANSIES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		e) Perangkat Keras Persandian/ Mesin Sandi f) Perangkat Lunak Sandi 3) Akreditasi dan Sertifikasi a) Akreditasi Diklat b) Sertifikasi Alat 3. Penggunaan Persandian A) Penggunaan sinyal: teknik sandi dan kriptografi 1) Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi) 2) Pelaporan B) Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi 1) Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi) 2) Pelaporan C) Meterial sandi: sistem dan peralatan 1) Pelaksanaan (Perencanaan Dan Administrasi) 2) Kunci Sistem Sandi 3) Data Pememputan Jaringan, Peralatan Sandi, dan Tempat Kegiatan Sandi 4) Pelaporan 4. Pengkajian Persandian : Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi A) Perencanaan Pengkajian B) Administrasi Pengkajian C) Pelaksanaan D) Pelaporan	Terbatas Terbatas Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka Biasa/Terbuka	Eselon III Eselon III Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISKOMINFO Kab. Balangan DISKOMINFO Kab. Balangan DISKOMINFO Kab. Balangan DISKOMINFO Kab. Balangan DISKOMINFO Kab. Balangan DISKOMINFO Kab. Balangan DISKOMINFO Kab. Balangan
XI		KEPUSTAKAAN 1. Deposit Bahan Pustaka a. Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam b. Pengkajian Data Penerbit dan Perusahaan Rekam c. Terbitan Internasional dan Regional d. Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam e. Bibliografi dan Katalog f. - Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) - Bibliografi Daerah (BID)	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISPUS Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLOH
1	2	3	4	5	6	7
		- Katalog Induk Nasional (KIN) - Katalog Induk Daerah (KID) - Katalog Dalam Tertbitan (KDT) - Pendaftaran Nomor Internasional Standard Book Number (ISBN) - Pendaftaran Nomor Internasional Standard Music Number (ISMN) 2. Pengembangan Koleksi a. Akuisisi - Pembelian - Hibah - Hadiah - Tukar Menukar - Implementasi Undang-Undang KCKR - Terbitan Internal - Pendistribusian bahan pustaka surplus - Inventarisasi koleksi (Buku Induk) - Dokumen pengadaan bahan pustaka sebelum proses belang b. Pengolahan Bahan Pustaka c. Pangkalan Data Katalog Koleksi 3. Jasa Perpustakaan dan Informasi a. Keanggotaan b. Sirkulasi c. Referensi d. Aih Aksara, Aih Bahasa dan Kajian Naskah Nusantara e. Kerjasama Perpustakaan - MoU - Perjanjian kerjasama - Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional f. Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan - Pengembangan situs web - Pengembangan kemas ulang informasi multimedia - Pengembangan program aplikasi perpustakaan - Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital g. Pangkalan Data Layanan Perpustakaan	Biasa/Tertutup Biasa/Tertutup Biasa/Tertutup Biasa/Tertutup Biasa/Tertutup Biasa/Tertutup Biasa/Tertutup Biasa/Tertutup Biasa/Tertutup Biasa/Tertutup Terbatas	Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon IV Eselon III	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	DISPUS Kab. Balangan DISPUS Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBAANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
		4. Preservasi Bahan Pustaka a. Konservasi - Perawatan Bahan Perpustakaan - Perbaikan Bahan Perpustakaan - Pengjilidan Bahan Perpustakaan b. Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto) c. Transformasi Digital d. Kurasi Digital 5. Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca a. Pengembangan Perpustakaan - Perpustakaan Umum - Perpustakaan Khusus - Perpustakaan Sekolah - Perpustakaan Perguruan Tinggi b. Akreditasi Perpustakaan - Permintaan akreditasi - Pemberian akreditasi c. Pengkajian Data Perpustakaan - Pengkajian data perpustakaan yang diakreditasi - Nomor Pokok Perpustakaan - Perpustakaan Berbasis Wilayah d. Pemasyarakatan Minat Baca Organisasi Perpustakaan - Forum Perpustakaan Umum - Forum Perpustakaan Khusus - Forum Perpustakaan Sekolah - Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi - Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca - Organisasi Perpustakaan Lainnya 6. Pengembangan Pustakawan a. Sertifikasi Tenaga Perpustakaan b. Pembinaan Tenaga Perpustakaan c. Penerbitan Jurnal d. Penilaian Jabatan Fungsional Pustakawan	Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISPUS Kab. Balangan
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISPUS Kab. Balangan
			Biasa/Terbuka	Eselon IV	Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Pemerintah Kab. Balangan	DISPUS Kab. Balangan

B. KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

NO	KODE KLASIFIKASI	JENIS ARSIP	KLASIFIKASI KEAMANAN	HAK AKSES	DASAR PERTIMBANGAN	UNIT PENGOLAH
1	2	3	4	5	6	7
XII		- Tim Penilai Pusat - Tim Penilai Unit Kerja - Tim Penilai Instansi - Tim Penilai Provinsi e. Pemasyarakatan f. Evaluasi Tenaga Perpustakaan g. Pengkalan data Tenaga Perpustakaan h. Pengkalan data Tim Penilai Pustakawan				
		PENGAWASAN 1. Rencana Pengawasan a. Rencana strategi pengawasan b. Rencana kerja tahunan c. Rencana kinerja tahunan d. Penetapan kinerja tahunan e. Rakor pengawasan tingkat Provinsi 2. Pelaksanaan Pengawasan a. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), yang memerlukan tindak lanjut (TL) b. Laporan Hasil Audit Investigasi (LHA) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut c. Laporan perkembangan penanganan surat pengaduan masyarakat d. Laporan Pemutakhiran Data e. Laporan Perkembangan Barang Milik Negara f. Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Pemerintah Prov. Kaltel h. Good Corporate Governance (GCG)	Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	Inspektori Daerah Kab. Balangan
			Terbatas	Eselon III	Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Pemerintah Kab. Balangan	Inspektori Daerah Kab. Balangan

BUPATI BALANGAN

H. ANSHARUDDIN